

RESTORASI KOLEKTIBILITAS DANA PINJAMAN BERGULIR PNPM MANDIRPERKOTAAN MELALUI SISTEM PENGORGANISASIAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS LOKAL DI KABUPATEN SITUBONDO

Submission date: 14-Mar-2021 06:35 PM (UTC+0700)
by Emy Khollah Rachmaningsih

Submission ID: 1533017379

File name: P_2015_prosiding_jember.pdf (503.01K)

Word count: 15826

Character count: 87789

**RESTORASI KOLEKTIBILITAS DANA PINJAMAN BERGULIR PNPM MANDIRI
PERKOTAAN MELALUI SISTEM PENGORGANISASIAN MASYARAKAT
BERBASIS KOMUNITAS LOKAL DI KABUPATEN SITUBONDO**

Emy Kholifah*, Syamsul Hadi, Toni Herlambang*****

***Staf Pengajar FISIP Universitas Muhammadiyah Jember**

**** Staf Pengajar Faperta Universitas Muhammadiyah Jember**

***** Staf Pengajar Faperta Universitas Muhammadiyah Jember**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi profil UKM/LKM, UPK dan KSM Ekonomi di semua desa sasaran P2KP-PNPM Mandiri Perkotaan; 2) Studi empirik aspek sosial budaya, dan ekonomi; 3) Mengkaji Pedoman dan SOP mulai dari P2KPI sampai Tahun 2010; 4) Mengetahui proses pelaksanaan program di lapangan dan dukungan pemerintah daerah terhadap program ini; 5) Menginventarisir data laporan keuangan bulanan setiap UPK yang berbasis kolektibilitas; dan 6) Mengidentifikasi penyebab rendahnya tingkat *Repayment Rate* (RR) dan tingginya resiko (K3-K5) kegiatan pinjaman bergulir di tingkat (KSM). Profil 30 UKM/LKM dengan Kategori Berdaya dengan skor 45%, sedangkan kinerja UPK rata-rata kurang memadai dengan rata-rata tingkat kolektibilitas kegiatan *Revolving Loan Fund* di Kabupaten Situbondo mencapai 40.32% tingkat *Rate Repayment* hanya 59.68%. Semenatra itu, sejumlah profil KSM Ekonomi di semua desa memiliki perkembangan dengan tahapan maju (109) nilai 106 – 140 yang dialami oleh sebanyak 53.33% KSM, selebihnya masih dalam tahapan berkembang. KSM di Desa Peleyan sudah tergolong Mandiri skornya mencapai 141. Hasil penelitian ini 1) Aspek Sosial: Kondisi sanitasi kesehatan masyarakat rata-rata kurang sehat (56.67%); Kelembagaan pendidikan kondisi cukup baik (66.67%) tingkat Partisipasi masyarakat rata-rata 83.33%; Kesempatan kerja cukup luas, angka pengangguran tinggi yaitu lebih 40%; 2) Aspek Budaya: Banyaknya kelembagaan non formal yang ada di lokasi; Kelompok masyarakat profesi dan kepemudaan terdapat pada 25% formal dan non formal (Ulama, Kiyai, Ustadz, Tokoh Masyarakat). 3) Aspek Ekonomi: sistem Irigasi baik (36.67%); Sebanyak < 33% responden menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat bidang perikanan/ kelautan juga kurang mengembirakan. 4) Hasil kajian konseptual terhadap Pedoman Pelaksanaan dan SOP Dana Pinjaman Bergulir (RLF) yang menjadi landasan hukum pelaksanaan program mulai dari P2KP berlaku umum dan bersifat normatif belum berbasis komunitas lokal. 5) Hasil kajian terhadap proses pelaksanaan program di lapangan dan dukungan pemerintah daerah terhadap program ini adalah sebagai berikut: Proses pembetukan UPK dan KSM ekonomi masih jauh dari pedoman pelaksanaan dan SOP yang ada. 7) Hasil inventarisasi data laporan keuangan bulanan kegiatan pinjaman bergulir pada setiap UPK yang berbasis kolektibilitas. Laporan keuangan bulanan UPK tidak selalu tepat waktu, Kondisi Kolektibilitas K1 sebesar 20%, K2 sebesar 3%, K3 sebesar 7%, K4 sebesar 3% dan paling banyak (67%) adalah K5. Hasil analisis akar penyebab rendahnya tingkat *Repayment Rate* (RR) dan tingginya resiko (K3-K5) Analisis Secara Simultannya variabel yang diduga berpengaruh nyata terhadap variabel dependnet. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Uji-F pada taraf nyata 1% dimana F-hitung (3.403) > F-tabel (2.99). Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.339 yang berarti tingkat kolektibilitas kegiatan RLF tersebut ditentukan oleh 33.9% variabel independent dalam model. Analisis Secara Parsial: Hasil analisis OLS menunjukkan sejumlah faktor akar penyebab tingkat Kolektibilitas kegiatan RLF berpengaruh nyata (signifikan) pada taraf nyata 10%, 5% dan 1% meliputi: 1) Peningkatan Keuntungan anggota KSM setelah mendapat RLF, 2) Jumlah anggota keluarga Peminjam, 3) Tingkat suku bunga, 4) Nilai besaran pinjaman setiap anggota KSM, 5) Proses pencairan RLF kepada anggota KSM dan 6) Persepsi anggota KSM tentang tingkat suku bunga yang diberlakukan. Selebihnya berpengaruh tidak nyata (non signifikan) terhadap variabel dependent.

Kata Kunci: Restorasi, kolektibilitas, PNPM MP, Pengorganisasian, Komunitas lokal

**RESTORATION OF COLECTIBILITY FOR REVOLVING LOAN FUND - PNPM
SELF-SUPPORTING OF URBAN THROUGH ORGANIZATIONAL SYSTEM
SOCIETY BASE ON LOCAL COMMUNITY IN SUB-PROVINCE OF SITUBONDO**

ABSTRACT

This research aim is to 1) Identifying profile of BKM, UPK and of KSM Economic in all target countryside 2) study of Empirik social aspects of culture, and economics; 3) Studying is conceptual of Guidance of Execution and of SOP Fund Loan of Bergulir 4) Knowing process execution of program in local government support and field 5) Registering monthly financial statement data activity of loan of bergulir in each UPK 6) Identifying low cause root of him mount Repayment Rate and height assess Colectibility at activity of RLF; and Compile organizational model of society base on local community to RLF activity. This research use descriptive method qualitative with technique research of survey. As for this research location is conducted to BKM, UPK and of KSM Economic in 30 target location intentionally. Pursuant to its source that collected data cover primary data and of secunder. Technique data collecting done with a few technique which is equipping each other covering: RRA, FGD, PRE, Indepth Interview and observation. Determination of responder sample taken Nonly each Probability Sampling counted 1 people of PK BKM, 3 people of UPK, and 3 People Member of KSM Economic where per BKM determined by economic KSM which selected by purposive sampling according to Fluent KSM and Need Attention (K1-K2), KSM Less Fluent (K3) and of KSM Questionable and Stuck (K4-K5). Special of member responder sample for KSM determined by simple sampling random, 30 people of PK LKM, 90 people of UPK and 90 people of KSM. Utilize to answer first target up to used by fifth of descriptive analysis, while to answer used by sixth target of model Analyse Doubled Linear Regresi and to answer used by seventh target of appliance of FFA base on SWOT. Result of this research conclude: Firstly, Profile 30 BKM in Sub-Province of Situbondo in general have growth with Powered catagory, while performance of UPK mean less adequate with mean mount colectibility activity of tired RLF 40.32% (RR 59.68%) and growth of Economic KSM in all countryside still in step go forward (53.33% KSM). Second, Result of study of empirik social aspect lay open that Condition of environmental sanitasi and Existence of education institute physically good enough in a condition (66.67%), Opportunity of activity enough wide, but condition of high unemployment number enough > 40%. As for at Cultural Aspect lay open that there are modern and traditional music art and also society culture of santri paternalistic. Thirdly, Result of conceptual study to Guidance of Execution and of SOP RLF still require to be completed by being based on local wisdom and community. Fourth, Process execution of program in field still less according to order going into effect and local government support to this program still require to be improved is. Fifth, Data monthly financial statement activity of loan of bergulir in each UPK in general is not unerring time. Sixth, root cause of height assess K at activity of RLF by simultan signifikan at real level 1%. As for result of analysis by parsial expressed that enhancement factor Advantage of member of KSM, Amount of Lender family member, Storey; Level rate of interest, Assess loan value each; every member of KSM, Process liquefaction of RLF and Perception of member of KSM about rate of interest storey; level is significant to height assess kolektibilitas, as for rest have an effect on is not real to variable dependent.

Keywords: Restoration, Colectibility, PNPM MP, Organizational, Local community

PENDAHULUAN

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai sebuah jawaban dalam upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat yang disebut BKM/LKM” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis)” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

P2KP-PNMP Mandiri Perkotaan di Kabupaten Situbondo dimulai sejak tahun 1999 bersama dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya baik diluncurkan dari pemerintah pusat, Propinsi maupun kabupaten seperti PPK, JPS, Raskin, BLT, PDM-DKE, Gerdu Taskin Jatim, PAM DKB Jatim, JAPES Jatim, ADD, PKH, PKP dan lain-lain. Namun fakta menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo pada tahun 2007 tergolong daerah termiskin ketiga, tetapi pada akhir tahun 2009 bergeser semakin terpuruk di urutan kedua se Propinsi Jawa Timur. P2KP (PNPM Mandiri Perkotaan) dengan strategi Tridayanya memiliki intervensi yang holistik dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu pemberdayaannya adalah di bidang ekonomi (*Revolving Loan Funding*) yang telah melahirkan 4.195 KSM ekonomi yang tersebar di 17 Desa Non PNPM dan 30 PNPM. Secara kuantitas jumlah KSM tersebut idealnya sudah dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, namun secara kualitas ternyata masih jauh dari indikator keberhasilan. Indikasinya bahwa rata-rata *repayment rate* di Kabupaten Situbondo sampai dengan saat ini masih kurang dari 50% dengan kolektibilitas

3- 4 (masa tunggakan angsuran antara 6 bulan – 9 bulan).

Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga saat ini telah terbentuk sekitar 6.405 LKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 243.838 KSM. Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat. BKM/LKM bersama masyarakat melakukan proses perencanaan partisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan. BKM/LKM sebagai badan legislatif membentuk tiga Unit Pelaksana (UP) diantaranya adalah UPK (Unit Pelaksana Keuangan). Selanjutnya UPK bersama BKM/LKM mengorganisasikan masyarakat dalam membentuk KSM Ekonomi sebagai penerima manfaat dana pinjaman bergulir.

Data Bappekab Situbondo tahun 2010 mengungkapkan bahwa KSM ekonomi yang sudah terbentuk mencapai 2.257 unit yang tersebar di 30 lokasi BKM PNPM dengan jumlah pemanfaat sekitar 15.077 orang. Fakta menunjukkan bahwa di Kabupaten Situbondo rata-rata tingkat RR di lokasi BKM PNPM per akhir tahun 2010 hanya mencapai kurang dari 50% dengan tingkat kolektibilitas antara K3-K4. Artinya (Diragukan) apabila peminjam menunggak > 6 bulan/kali angsuran sampai dengan 9 bulan/kali angsuran dengan risiko 50% dari saldo kredit serta Kolektibilitas 5 (Macet) apabila peminjam menunggak > 9 bulan/kali angsuran dengan tingkat resikonya 100% dari saldo kredit. Artinya bahwa tingkat kemandirian masyarakat Kabupaten Situbondo masih perlu dikuatkan dan memperoleh

perhatian yang amat serius dari semua pihak. SOP pinjaman bergulir tidak mengatur tentang bagaimana pola pengorganisasian UPK dan KSM ekonomi yang berbasis komunitas lokal, tetapi masih bersifat normatif. Oleh karena itu penelitian ini perlu diungkap akar penyebab tingginya tingkat kolektibilitas, agar dapat ditemukan solusinya yang lebih baik.

Oleh karena itu, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi profil BKM/LKM, UPK dan KSM Ekonomi di semua desa sasaran P2KP-PNPM Mandiri Perkotaan; 2) Studi empirik aspek-aspek sosial budaya, dan ekonomi di daerah desa sasaran program; 3) Mengkaji konseptual Pedoman Pelaksanaan dan SOP Dana Pinjaman Bergulir (RLF) yang menjadi landasan hukum pelaksanaan program mulai dari P2KP1.1 sampai dengan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2010; 4) Mengetahui proses pelaksanaan program di lapangan dan dukungan pemerintah daerah terhadap program ini; 5) Menginventarisir data laporan keuangan bulanan kegiatan pinjaman bergulir pada setiap UPK yang berbasis kolektibilitas; dan 6) Mengidentifikasi akar penyebab rendahnya tingkat *Repayment Rate* (RR) dan tingginya resiko (K3-K5) pada kegiatan pinjaman bergulir di tingkat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada setiap kategori. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: Sebagai dasar pengambil kebijakan dalam menyempurnakan (restorasi) model kegiatan pinjaman ekonomi bergulir khususnya untuk pengorganisasian dengan mempertimbangkan komunitas dan kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat (Whitney, 1960). Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei (Nazir, 1985). Peneliti ingin melihat sejauh mana kondisi kegiatan pinjaman bergulir yang berbasis kolektibilitas secara obyektif dan faktual, potensi dan masalah yang ada, dan capaian indikator keberhasilan untuk

selanjutnya diambil sebuah kesimpulan secara inferensial

Penentuan Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah berlangsung pada tahun 2011 untuk data tahun 1999 sampai dengan 2010. Adapun lokasi penelitian ini telah dilaksanakan di Kabupaten Situbondo dimana pada tahun pertama dengan mengambil lokasi sampel di 30 desa sasaran PNPM Mandiri Perkotaan yang tersebar di Kecamatan Panarukan, Situbondo, Mangaran dan Asembagus secara *purposive sampling* menurut Lokasi Lama (P2KP) Angkatan 1999, Lokasi Lama (PNPM MP) Angkatan 2007 dan Lokasi Baru (PNPM MP) Angkatan 2009. Sedangkan pada tahun kedua hanya mengambil 10 desa sasaran sesuai dengan hasil uji coba model yang tersebar pada keempat wilayah kecamatan dengan berbagai kategori lokasi dilakukan pada tahun 2012 untuk data tahun 2011. Selain itu juga akan dikumpulkan data sekunder yang relevan pada instansi terkait secara institusional.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumbernya bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari BKM, UPK dan KSM Ekonomi dengan cara gabungan beberapa teknik yang saling melengkapi yang meliputi: *Rapid Rural Appraisal* (RRA), *Focus Group Discussion* (FGD), *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Indepth Interview* dan *observasi*. Sedangkan untuk data sekunder diambil dari sumber yang terkait dengan penelitian ini seperti Satker, PPK, PjOK, Pemerintahan Desa, Konsultan Pendamping dari Tingkatan Kabupaten/Kota (Kekoorkotan: Koordinator Kota, Asisten Koorkot, Senior Faskel dan Faskel Ekonomi).

Metode Penentuan Sampel

Jenis polulasi dalam penelitian ini terdiri atas tiga macam, yaitu: 1) BKM, 2) UPK, dan 3) KSM ekonomi. Adapun jumlah Pimpinan Kolektif (PK) BKM antara 9-13 orang dengan 1 Koordinator, Anggota UPK

antara 3 orang dengan 1 manajer dan Anggota KSM Ekonomi antara 5–20 orang dengan 3 orang pengurus. Oleh sebab itu, penentuan sampel responden dari ketiga populasi tersebut diambil secara *Non Probability Sampling* masing-masing sebanyak 1 orang PK BKM, 3 orang UPK, dan 3 Orang Anggota KSM Ekonomi dimana per BKM ditentukan 1 KSM ekonomi yang dipilih secara *purposive sampling* menurut KSM Lancar dan Perlu Perhatian, KSM Kurang Lancar dan KSM Diragukan dan Macet. Khusus kuintak sampel responden anggota KSM ditentukan secara *simple random sampling* atas pertimbangan bahwa jumlah anggota tersebut bervariasi tiap KSM (Wuisman, 1991).

Teknik Analisis Data

Guna menjawab tujuan pertama sampai dengan kelima digunakan analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran lebih mendalam (terperinci) tentang kondisi faktual secara utuh yang mengacu kepada Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan dan SOP. Hal ini penting untuk mengetahui secara esensial mengenai kesesuaian proses pelaksanaan program terhadap mekanisme yang ditetapkan. Sementara itu, untuk menjawab tujuan keenam tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas kurang baik di tingkat KSM, maka dapat digunakan model Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan alat bantu pengolahan data yaitu aplikasi Program SPSS for Windows Ver 16.

Selanjutnya guna menjawab tujuan ketujuh yaitu untuk menyusun model atau sistem pengorganisasian masyarakat sebagai wujud hasil restorasi model sebelumnya, maka digunakan alat Analisis Kekuatan Medan (*Force Field Analysis*) berbasis Lingkungan SWOT. Adapun teknik Analisis Kekuatan Medan ini yaitu dengan menginventarisir semua faktor pendorong dan penghambat yang ada di lingkungan intern dan ekstern UPK dengan kegiatan RLF-nya. Kemudian masing-masing faktor tersebut diberikan nilai skor

sesuai dengan rating/bobot kekuatan pengaruh untuk menuju ke arah keseimbangan semula, yaitu sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi wilayah Kabupaten Situbondo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil BKM/LKM, UPK dan KSM Ekonomi

Proses awal pembangunan LKM dimulai dengan sosialisasi sampai dengan tingkat basis dan diakhiri di tingkat kelurahan yang sekaligus dilakukan pembentukan panitia pembangunan LKM (Pemilu Ulang) yang terdiri dari Pokja Pemilihan, Pokja Penyusunan Draf Anggaran Dasar LKM dan Pokja Pemantau dengan jumlah yang didasarkan kepada jumlah RT dan RW serta SOP Pemilu LKM 2010. Adapun jumlah Pimpinan Kolektif BKM/LKM antara 9 – 13 orang dengan membawahi 3 kelengkapan organisasi ini yaitu Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK).

Bahwa anggota PK LKM di Kabupaten Situbondo cukup mengakomodasi kepentingan perempuan, dimana hal ini ditunjukkan dengan fakta rata-rata jumlah perempuan yang terpilih menjadi PK LKM mencapai 50% dari jumlah laki-laki. Konsep kesetaraan gender sebagaimana yang diamanatkan IPM-MDGs telah memenuhi standar, dimana minimal keterwakilan kaum perempuan dalam setiap kepengurusan mencapai 30%. Sementara itu, juga dapat digambarkan bahwa jumlah KSM yang telah terbentuk pada setiap LKM/BKM sejak tahun 1999 mencapai 51 KSM Ekonomi dengan anggota sebanyak 269 orang. Adapun mengenai jumlah BLM yang diterima oleh setiap LKM/BKM sejak tahun 2005 dan jumlah KSM ekonomi yang sudah terbentuk baik masih eksis maupun sudah tidak teridentifikasi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Sebaran LKM/BKM pada PNPMP2KP Kabupaten Situbondo Menurut Jumlah BLM dan Jumlah KSM Ekonomi Tahun 2011

No	Nama BKM/LKM	Des/Kelurahan	Total BLM yang Diterima (Rp)				Jumlah KSM Ekonomi		Audit Independent (Eksternal)		
			2005	2007	2009	2010	Unit	Anggotanya (Orang)	2007	2009	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Surya Alasmalang	Alas Malang	350.000.000	350.000.000	200.000.000	-	33	438	WTP	WTP	WTP
2	Sejahtera	Asembagus	350.000.000	300.000.000	200.000.000	-	86	520	WTP	WTP	WDP
3	Kusuma	Dawuhan	500.000.000	300.000.000	200.000.000	-	138	1.313	WTP	WTP	WTP
4	Gudang Sejahtera	Gudang	350.000.000	300.000.000	200.000.000	300.000.000	73	326	WTP	WTP	WTP
5	Sentosa	Kertosari	350.000.000	300.000.000	200.000.000	200.000.000	90	684	WTP	WTP	WTP
6	Barokah	Kilensari	500.000.000	350.000.000	200.000.000	200.000.000	119	194	WTP	WDP	WTP
7	Karya Mandiri	Kotakan	500.000.000	300.000.000	200.000.000	200.000.000	203	441	WTP	WTP	WTP
8	Mitara Usaha	Mangaran	350.000.000	300.000.000	200.000.000	-	49	245	WDP	WDP	WDP
9	Tunas Harapan	Olean	500.000.000	300.000.000	200.000.000	200.000.000	49	349	WDP	WDP	WTP
10	Harapan	Patokan	500.000.000	350.000.000	200.000.000	200.000.000	123	378	WDP	WDP	WDP
11	Gotong Royong	Perante	350.000.000	300.000.000	200.000.000	200.000.000	104	405	WDP	WDP	WTP
12	Bina Sejahtera	Sumber Kolak	350.000.000	300.000.000	350.000.000	-	55	286	WTP	WDP	WTP
13	Jaya Barokah	Tanjung Glugur	350.000.000	300.000.000	250.000.000	-	79	553	WTP	WTP	WDP
14	Jaya Makmur	Trebungan	350.000.000	300.000.000	200.000.000	200.000.000	52	260	WTP	WTP	WTP
15	Prima Usaha	Trigonco	350.000.000	300.000.000	200.000.000	-	88	288	WTP	WTP	WDP
16	Wringin Agung	Wringin Anom	350.000.000	350.000.000	200.000.000	-	57	245	WTP	WTP	WDP
17	Abadi	Gelung	-	300.000.000	200.000.000	150.000.000	11	126	WTP	WTP	WDP
18	Harapan Jaya	Duwet	-	200.000.000	100.000.000	100.000.000	17	174	WTP	WTP	WTP
19	Peleyan Indah	Peleyan	-	300.000.000	200.000.000	150.000.000	37	236	WTP	WTP	WTP
20	Paowan Mangga raya	Paowan	-	300.000.000	200.000.000	150.000.000	30	293	WTP	WTP	WDP
21	Sumber Makmur	Mojosari	-	-	200.000.000	200.000.000	4	25			WTP
22	Cipta Sejahtera	Kedonglo	-	-	200.000.000	200.000.000	4	24			WTP
23	Asri	Bantal	-	-	200.000.000	200.000.000	4	27			WTP
24	Sejahtera	Awar-Awar	-	-	110.000.000	150.000.000	3	21			WTP
25	Wringin Mandiri	Wringin Anom	-	-	200.000.000	200.000.000	3	23			WTP
26	Sejahtera	Tanjung Kamal	-	-	200.000.000	200.000.000	4	24			WTP
27	Sekar Tanjung	Tanjung Pacinan	-	-	200.000.000	200.000.000	4	24			WTP
28	Mutiara Sejati	Semiring	-	-	200.000.000	200.000.000	4	27			WTP
29	Barokah	Kalibagor	-	-	150.000.000	200.000.000	3	43			WTP
30	Tegal Arum	Takandang	-	-	200.000.000	200.000.000	4	64			WTP
Jumlah			6.350.000.000			4.200.000.000	1.530	8.056			
Rata-Rata			211.666.667			140.000.000	51	269			

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2011

Pada tabel 3.1 juga digambarkan hasil audit eksternal (independent) sejak tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2011 bahwa sebesar 23.33% LKM/BKM dinyatakan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sejatinya sebesar 25% juga hampir dinyatakan opini WDP juga namun masih dapat menunjukkan bukti sah dokumen kepada Auditor. Kondisi ini sesungguhnya menunjukkan bahwa betapa masa waktu yang cukup lama berdirinya sebuah kelembagaan tersebut tidak menunjukkan linier terhadap kemajuan yang dicapai. Bahkan sebagian terutama LKM/BKM yang lebih dahulu dilahirkan, justru mengalami fenomena

sebaliknya. Salah satu faktornya adalah bahwa proses pelaksanaan PNPMP (Awalnya bernama P2KP) disinyalir kurang sesuai mekanisme yang ditetapkan dan komitmen para pelakunya diduga kuat sangat lemah. Pengambilan keputusan, perempuan dalam pengambilan keputusan, mekanisme penyerapan usulan masyarakat, partisipasi anggota PK LKM dan rapat pertemuan BKM.

Adapun faktor eksternal antara lain meliputi faktor sosial budaya masyarakat, dinamika kelompok masyarakat, komitmen pemerintah kelurahan/desa, komitmen *stake holders* terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, munculnya kelompok peduli,

dan yang terpenting adalah optimal tidaknya peran fasilitasi pendamping sebagai bagian dari *agent of change*. Berdasarkan proses penilaian perkembangan kinerja LKM/BKM di Kabupaten Situbondo dengan menggunakan metode *Institutional Development Framework (IDF)* atau Kerangka Pengembangan Organisasi, maka hasilnya menyimpulkan bahwa LKM ini rata-rata termasuk dalam **Kategori Berdaya dengan skor 45%**.

Namun terdapat LKM yang bernama Peleyan Indah Desa Peleyan Kecamatan Panarukan memiliki nilai skor 50.80% atau kurang dari 0.20% sudah dikategorikan **menuju mandiri**. Capaian kinerja yang signifikan ini ditandai LKM telah memiliki tujuan dan rencana serta perangkat organisasi walaupun belum berjalan optimal. Secara lebih rinci mengenai kondisi perkembangan LKM berdasarkan faktor internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Indah Desa Peleyan Kecamatan Panarukan memiliki nilai skor 50.80% atau kurang dari 0.20% sudah dikategorikan **menuju mandiri**. Capaian kinerja yang signifikan ini ditandai LKM telah memiliki tujuan dan rencana serta perangkat organisasi walaupun belum berjalan optimal. Secara lebih rinci mengenai kondisi perkembangan LKM berdasarkan faktor internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

No	Nama BKM/LKM	Alamat	Berdiri	Jumlah Skor Perkembangan	Kategori
1	2	3	4	5	6
1	Surya Alasmalang	Alas Malang	2.003	49,55%	Berdaya
2	Sejahtera	Asembagus	2.003	45,23%	Berdaya
3	Kusuma	Dawuhan	1.999	47,98%	Berdaya
4	Gudang Sejahtera	Gudang	2.003	49,66%	Berdaya
5	Sentosa	Kertosari	2.003	47,74%	Berdaya
6	Barokah	Kilensari	1.999	45,99%	Berdaya
7	Karya Mandiri	Kotakan	2.003	46,88%	Berdaya
8	Mitara Usaha	Mangaran	2.003	42,22%	Berdaya
9	Tunas Harapan	Olean	2.003	41,09%	Berdaya
10	Harapan	Patokan	1.999	47,33%	Berdaya
11	Gotong Royong	Perante	2.003	48,75%	Berdaya
12	Bina Sejahtera	Sumber Kolak	1.999	49,18%	Berdaya
13	Jaya Barokah	Tanjung Glugur	2.003	42,29%	Berdaya
14	Jaya Makmur	Trebungan	2.003	41,57%	Berdaya
15	Prima Usaha	Trigonco	2.003	29,99%	Tertinggal
16	Wringin Agung	Wringin Anom	2.003	39,67%	Berdaya
17	Abadi	Gelung	2.007	45,59%	Berdaya
18	Harapan Jaya	Duwet	2.007	48,21%	Berdaya
19	Peleyan Indah	Peleyan	2.007	50,80%	Menuju Mandiri
20	Paowan Mangga raya	Paowan	2.007	47,04%	Berdaya
21	Sumber Makmur	Mojosari	2.009	44,87%	Berdaya
22	Cipta Sejahtera	Kedonglo	2.009	46,99%	Berdaya
23	Asri	Bantal	2.009	46,29%	Berdaya
24	Sejahtera	Awar-Awar	2.009	44,89%	Berdaya
25	Wringin Mandiri	Wringin Anom	2.009	45,21%	Berdaya
26	Sejahtera	Tanjung Kamal	2.009	46,66%	Berdaya
27	Sekar Tanjung	Tanjung Pacinan	2.009	43,95%	Berdaya
28	Mutiara Sejati	Semiring	2.009	46,99%	Berdaya
29	Barokah	Kalibagor	2.009	42,38%	Berdaya
30	Tegal Arum	Takandang	2.009	45,61%	Berdaya
Jumlah				1311%	-
Rata-Rata				45%	

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2011

Capaian kinerja paling rendah dialami oleh BKM Prima Usaha Desa Trigonco Kecamatan Asembagus dimana hanya mencapai 29.99% yaitu kategori **Tertinggal**. Meskipun demikian bahwa BKM tersebut sesungguhnya hampir mencapai Katagori **Berdaya** yaitu kurang **0.02%** agar lebih dari jumlah skor 30%. Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah salah satu unit yang ada di PK LKM/BKM selain Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit

Pengelola Sosial (UPS). UPK merupakan urat nadi bagi kehidupan BKM/LKM di masa akan datang, walaupun LKM tidak memperoleh BLM lagi, namun jika kegiatan perguliran ini terus berkembang maju, maka eksistensi LKM ke depan masih tetap mandiri secara berkelanjutan apalagi dapat membaangun kemitraan dnegan pihak ketiga. Secara lebih terinci mengenai profil UPK di dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Sebaran UPK pada PNPM P2KP Kabupaten Situbondo Menurut Capaian Kinerja Tahun 2011

No	Nama BKM/LKM	Nama Manajer UPK	Jumlah Anggota UPK (Org)		Jumlah KSM	
			Laki	Perempuan	Unit	Anggota (Orang)
1	2	5	6	7	6	7
1	Wiringin Agung - Wringinanom	Fatmawati	1	2	58	104
2	Tunas Harapan - Olean	Handayani	3	-	4	25
3	Tegal Arum - Talkandang	Wika	2	1	8	80
4	Gudang Sejahtera - Gudang	Maufiroh	1	2	73	326
5	Sumber Makmur - Mojosari	Lilik Wahyuningsih	2	1	13	61
6	Wiringin Mandiri, Wringinanom	Atikatul Fitriyah	-	3	47	235
7	Sentosa - Kertosari	Yulis Andriyani	2	1	71	355
8	Sejahtera - Asembagus	Indriyati	1	2	55	330
9	Sejahtera - Tanjung Kamal	Nanang	-	3	2	12
10	SekarTanjung - TanjungPacinan	Betaria	1	2	5	34
11	Gotong Royong - Perante	Nurul Qomariyah	1	2	20	115
12	Mutiara Sejati - Semiring	Zumroti	1	2	5	38
13	Cahaya Sejahtera - Bantal	Sukarno	2	1	4	38
14	Prima Usaha - Trigonco	Satriawan	2	1	9	63
15	Sejahtera - Awar-Awar	Syaifullah	2	1	25	125
16	Maju Sejahtera - Sumberkolak	Lilik Sundari	1	2	4	28
17	Harapan - Patokan	Sulastri	3	-	39	247
18	Jaya Barokah - Tanjung Glugur	Mat Hasan	1	1	56	336
19	Kusuma - Dawuhan	Maskuri	1	2	69	469
20	Sumber Makmur - Mangaran	Mulyadi	-	3	1	5
21	Jaya Makmur - Trebungan	Mursyid	-	3	3	15
22	Karya Mandiri - Kotakan	Ahmad Sudiono	2	1	86	430
23	Asri - Kedonglo	Misyani	2	1	45	226
24	Barokah - Kalibagor	Arika	2	1	4	54
25	Surya Alasmalang -Alasmalang	Nanda Suci F.,SE.	1	2	79	632
26	Barokah - Kilensari	Lilik Handayani	2	1	15	135
27	Peleyan Indah - Peleyan	Sulasih	-	3	25	300

28	Paowan Mangga Raya -Paowan	Mistahul	-	3	9	54
29	Harapan Jaya - Duwet	Fatmawati	-	3	7	63
30	Abadi - Gelung	Sunawi	1	2	10	50
Jumlah			37	52	1.053	5.087
Rata-Rata			1	2	35	170

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2011

Sementara itu, kondisi keuangan UPK di Kabupaten Situbondo pada tahun 2011 ini sangat mengkuatirkan semua pihak. Kelembagaan mandiri yang sejak lama dilahirkan, tidak ada jaminan untuk lebih maju dan berkembang dibandingkan yang baru lahir. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa UPK enggan melakukan pembukuan

setiap bulan, bahkan terdapat UPK yang ditemukan tidak melakukan pembukuan atau mempuat lepaoran keuangan lebih dari satu tahun hingga menjelang dilakukan audit eksternal. Gambaran mengenai kondisi keuangan (*Cash-Flow*) di setiap UPK Kabupaten Situbondo tahun 2011 ini disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Kondisi Keuangan (*Cash-Flow*) UPK pada PNPMP2KP Kabupaten Situbondo Menurut Pembukuan Tahun 2011

NO	Nama Responden UPK	BLM Awal Berdiri	BLM sampai dengan Hari ini	Modal dari Pihak Ketiga (Chandling)	BLM Modal Perguliran (Di Neraca) = 3+4+7	SHU Sampai Dengan Hari Ini	Alokasi Untuk Pemupukan Modal	Alokasi Untuk Infrastruktur	Alokasi Untuk Sosial	Alokasi Untuk BOP LKM	Alokasi Untuk Gaji UPK	Alokasi Untuk Lain-Lain	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Sairin	114.000.000			-	-	-	-	-	1.155.000	-	-	991.569
2	Pumomo	76.000.000	76.000.000		76.000.000	314.000	-	-	-	100.000	-	-	2.201.353
3	Supnyadi	20.000.000	20.000.000		20.000.000	473.732	-	-	-	1.710.000	421.834	-	1.508.732
4	Yos Prayitno	76.000.000	69.300.000		76.800.760	2.093.565	6.890.760	7.925.690	-	-	900.000	-	428.000
5	Nur Samsi	19.250.000	19.250.000		19.413.500	544.932	163.500	544.900	-	-	483.750	67.626	420.283
6	Misnai Thohir	19.250.000	19.250.000		19.541.100	970.318	291.100	-	-	473.000	257.400	-	328.950
7	H. Moh. Salim	76.000.000	69.300.000		86.904.900	15.422.178	17.604.900	2.917.450	-	1.200.000	25.000	-	749.548
8	A. Fauzi Y	74.073.065	-		-	(229.939)	-	-	-	-	-	52.500	539.700
9	Agus Sopyan, SPD	11.250.000	11.250.000		11.250.000	(210.431)	-	-	-	-	-	-	2.812.500
10	Sumarwan	11.250.000	11.250.000		11.250.000	-	-	-	-	-	-	-	659.000
11	Hayim Ilyas	76.000.000	57.750.000		59.910.000	14.248.656	2.160.000	-	-	7.200.200	947.500	815.487	815.700
12	Suryadi	11.500.000	11.500.000		11.982.500	1.608.285	482.500	-	-	1.608.500	100.000	-	926.500
13	Rasyid	19.250.000	-		-	-	-	-	-	-	-	317.500	1.000
14	Ir. Nanang HJ	76.000.000	-		-	(17.011)	-	-	-	-	-	45.000	328.200
15	Bukarsa	10.500.000	10.500.000		10.823.250	1.077.512	323.250	-	-	-	240.000	105.000	214.700
16	Ari Purwanto	270.375.000	240.375.000		287.714.582	-	47.339.582	-	-	-	-	75.000	-
17	Abdul rasyid, Des	480.293.750	-		42.698.555	28.564.955	42.698.555	-	-	11.188.936	4.400.000	-	2.400.000
18	Abdul Wahid	76.000.000	26.950.000		27.414.500	3.610.228	464.500	4.842.000	-	1.280.000	155.000	-	6.779.900
19	Romul D F	480.793.750	69.300.000		71.226.790	5.867.936	1.926.790	-	-	13.754.510	-	-	34.315.931
20	Arwijanto	76.000.000	2.000.000		2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000
21	Abdul Azis	76.000.000	45.000.000		45.769.750	-	769.750	-	-	-	-	-	1.297.383
22	Si Yuli	76.000.000	88.400.000		98.764.894	6.466.887	10.364.894	5.118.667	3.412.445	1.706.222	400.000	6.824.890	460.915
23	Abd. Latif	19.250.000	19.250.000		19.831.400	1.937.988	581.400	1.937.900	-	-	420.000	35.000	838.000
24	Budi Aesono	15.000.000	15.000.000		15.000.000	1.564.175	-	-	-	-	600.000	354.000	10.468.000
25	Arika	76.000.000	183.800.000		196.614.760	14.755.053	12.814.760	-	-	4.700.000	-	-	1.048.550
26	Jumadi	240.723.500	238.637.745		242.196.495	1.472.595	3.558.750	-	-	-	1.245.563	-	238.637.745
27	Ilda Yanti	175.744.000	158.307.333		183.995.233	8.251.233	25.687.900	-	-	5.137.580	8.990.765	-	153.169.753
28	Kurdi, S.Sos	163.956.000	162.234.000		165.032.500	1.076.500	2.798.500	-	-	559.700	979.475	-	161.674.300
29	Fatmawati	95.800.000	95.238.194		97.925.694	2.125.694	2.687.500	-	-	537.500	940.625	-	94.700.694
30	Sunawi	62.500.000	11.406.400		21.651.400	(40.848.600)	10.245.000	175.133	175.133	350.266	1.050.798	-	10.705.868
Jumlah		3.074.759.065	1.731.248.672		1.921.102.563	71.140.841	189.853.891	23.461.740	3.587.578	42.043.414	32.316.475	9.551.237	729.822.774
Rata-Rata		102.491.969	59.698.230	#DIV/0!	64.086.752	2.371.361	6.328.463	809.026	123.710	1.449.773	1.114.361	329.353	24.327.426

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2011

Kondisi UPK di atas sangat mengkuatirkan bila kurang perhatian dari semua pihak atau setidaknya para pelaku program yang lain termasuk pemerintah desa dan daerah, alasan rasional dan manusiawi bahwa pekerjaan di PNPM MP adalah pengabdian dengan gaji hanya cukup untuk transportasi dengan beban rasio pekerjaan yang amat berat, sementara di

sisi lain pekerjaan utama seringkali terabaikan, sehingga sering terjadi pengurus UPK yang mengundurkan diri. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula bila jumlah tunggakan pinjaman oleh KSM terhadap UPK-BKM di Kabupaten Situbondo cukup besar sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.5. Kondisi Jumlah Tunggakan Pinjaman dalam Setiap UPK pada PNPM P2KP Kabupaten Situbondo Tahun 2011

NO	Nama Responden UPK	Pinjaman yang Pernah Disalurkan (Omset Akumulatif)	Angsuran pokok Seharusnya (Akumulatif) = 9 - 12	Angsuran pokok Realisasi & PH (Akumulatif) = 9 - 13	Saldo Pinjaman Seharusnya = 13 - 14	Saldo pinjaman (Realisasi Saldo di Neraca)	Jumlah Tunggakan Angsuran
1	Salimin	114.000.000	87.011.421	1.539.650	26.988.579	112.460.350	85.471.771
2	Purnomo	125.750.000	76.883.000	76.883.000	74.713.000	74.713.000	70.182.858
3	Supriyadi	38.750.000	17.330.000	17.330.000	21.420.000	21.420.000	-
4	Yos Prayitno	173.000.000	114.510.000	73.460.000	58.490.000	99.540.000	41.050.000
5	Nur Samsi	47.750.000	26.350.000	26.350.000	21.400.000	21.400.000	-
6	Mismai Thohir	42.750.000	30.678.000	30.678.000	12.072.000	12.072.000	-
7	H. Moh. Salim	183.216.000	10.000	-	183.206.000	183.216.000	-
8	A. Fauzi Y	72.857.650	72.857.650	-	-	72.857.650	72.857.650
9	Agus Sopyan,SPD	13.750.000	3.700.000	2.900.000	10.050.000	10.850.000	800.000
10	Sumarwan	11.250.000	10.591.000	-	659.000	11.250.000	10.591.000
11	Hayim Ilyas	149.910.700	79.220.700	79.220.700	65.690.000	65.690.000	-
12	Suryadi	17.000.000	5.800.000	5.800.000	11.200.000	11.200.000	-
13	Rasyid	19.250.000	12.379.000	12.379.000	6.871.000	6.871.000	-
14	Ir. Nanang H.l	84.814.080	84.814.080	-	-	84.814.080	84.814.080
15	Bukarsa	29.000.000	18.500.000	18.500.000	10.500.000	10.500.000	-
16	Ari Purwanto	178.766.500	-	-	178.766.500	178.766.500	178.766.500
17	Abdul rasyid, Drs	502.746.196	437.630.017	11.609.399	125.116.179	551.136.797	426.020.618
18	Abdul Wahhid	96.799.556	82.296.175	916.025	14.503.383	95.883.533	81.380.150
19	RonalD F	571.642.986	34.346.876	34.346.876	537.296.110	537.296.110	-
20	Arwiyanto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
21	Abdul Azis	4.500.000	2.610.000	2.610.000	1.890.000	1.890.000	-
22	Sri Y uli	198.694.007	147.645.757	70.501.007	51.048.250	128.193.000	77.144.750
23	Abd. Latif	24.750.000	-	-	-	20.800.000	-
24	Budi Arsono	30.300.000	-	-	9.180.000	9.180.000	-
25	Arida	261.735.650	208.852.650	84.365.400	52.883.000	177.370.250	124.487.250
26	Jumadi	540.723.780	25.029.065	2.085.755	515.694.715	538.638.025	22.943.310
27	Ida Yanti	337.744.439	22.596.667	17.436.667	315.147.773	320.307.772	5.160.000
28	Kurdi, S.Sos	263.000.000	17.220.000	1.722.000	245.780.000	261.278.000	15.498.000
29	Fatma wati	125.800.000	5.283.333	561.806	120.516.667	125.238.194	4.721.528
30	Sunawi	129.652.000	4.291.722	357.644	125.360.278	11.406.400	36.930.500
	Jumlah	4.391.903.544	1.630.437.113	573.552.928	2.798.442.433	3.758.238.661	1.338.819.964
	Rata-Rata	146.396.785	54.347.904	19.118.431	93.281.414	125.274.622	44.627.332

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2011

Rata-rata jumlah tunggakan angsuran UPK adalah Rp 44.627.332,- dengan jumlah total sebanyak Rp 1.338.819.964,- di seluruh Kabupaten, itupun sebagian UPK masih ada yang sulit diidentifikasi nilai tunggakannya dan apabila sudah dapat tergalai semua, maka nilai tunggakannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1.5 milyar. Oleh karena itu, maka tingkat RR di Kabupaten Situbondo pada tahun 2011 ini sangat rendah dan

Kolektibilitasnya tinggi. Mengnai kondisi RR dan Kolektibilitas kegiatan RLF di Kabupaten Situbondo disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Kondisi RR dan NPL dalam Setiap UPK pada PNPM P2KP Kabupaten Situbondo Tahun 2011

NO	Nama Responden UPK	Tingkat Perputaran Modal (%)	Tingkat Modal Dana Bergulir Produktif (%)	Tingkat Modal Produktif (%)	Saldo Pinjaman menunggak lebih dari 9 kali (bln) = M (K\$)	Tingkat Pengembalian (RR) (%)	Tingkat Pinjaman Macet (%)	Modal Kerja Bersih (Rp)	PL (Performing Loan) (%)	NPL (Non Performing Loan) (%)
1	Salimin	102,60%	102,60%	98,02%	85.471.771	24,00%	76,00%	28.088.089	24,00%	76,00%
2	Purnomo	110,84%	37,49%	35,50%	70.182.858	29,79%	70,21%	6.791.726	29,79%	70,21%
3	Supriyadi	224,19%	61,71%	50,30%	-	100,00%	0,00%	21.666.348	100,00%	0,00%
4	Yos Pravitno	110,89%	37,49%	35,56%	41.050.000	29,79%	70,21%	20.791.726	29,79%	70,21%
5	Nur Samsi	128,57%	108,05%	91,24%	-	0,00%	100,00%	22.993.013	0,00%	100,00%
6	Misnai Thohir	222,08%	62,72%	52,30%	-	100,00%	0,00%	23.383.274	100,00%	0,00%
7	H. Moh. Salim	126,09%	126,08%	102,35%	-	100,00%	0,00%	178.310.202	100,00%	0,00%
8	A. Fauzi Y	9,83%	0,00%	0,00%	72.857.650	0,00%	100,00%	985.476	0,00%	100,00%
9	Agus Sopyan, SP.D	122,00%	96,40%	83,70%	-	100,00%	0,00%	14.021.692	100,00%	0,00%
10	Sumarwan	100,00%	94,00%	5,75%	10.591.000	0,00%	100,00%	1.841.191	0,00%	100,00%
11	Hayim Ilyas	190,00%	86,40%	43,00%	-	100,00%	0,00%	70.725.632	100,00%	0,00%
12	Suryadi	147,80%	97,39%	87,80%	22.943.310	100,00%	0,00%	9.606.345	100,00%	0,00%
13	Rasyid	100,00%	35,70%	29,00%	9.880.000	61,21%	38,79%	23.413.332	61,21%	38,79%
14	Ir. Nanang HJ	11,15%	0,00%	97,49%	84.814.080	0,00%	100,00%	2.183.015	0,00%	100,00%
15	Bukarsa	276,19%	100,00%	77,90%	77.144.750	100,00%	0,00%	13.580.637	100,00%	0,00%
16	Ari Purwanto	0,05%	1,81%	4,11%	178.766.500	5,29%	94,71%	112.460.350	5,29%	94,71%
17	Abdul rasyid, Drs	117,16%	147,50%	97,93%	7.822.000	53,11%	46,89%	72.928.539	53,11%	46,89%
18	Abdul Wahhid	6,60%	93,60%	0,00%	15.600.000	6,50%	93,50%	9.000.000	6,50%	93,50%
19	RonalD F	103,91%	97,67%	93,99%	21.800.000	100,00%	0,00%	571.642.976	100,00%	0,00%
20	Arwiyanto	100,00%	100,00%	2,60%	124.487.250	94,00%	6,00%	2.400.000	94,00%	6,00%
21	Abdul Azis	100,00%	42,00%	42,30%	81.380.150	100,00%	0,00%	3.284.510	100,00%	0,00%
22	Sri Yuli	120,00%	77,97%	62,09%	10.500.000	39,83%	60,17%	125.763.774	39,83%	60,17%
23	Abd. Latif	128,57%	108,05%	91,24%	426.020.618	0,00%	100,00%	22.993.013	0,00%	100,00%
24	Budi Arsono	222,08%	62,72%	52,30%	-	100,00%	0,00%	17.566.889	100,00%	0,00%
25	Arida	89,56%	96,50%	81,27%	93.761.850	18,73%	81,27%	87.213.023	18,73%	81,27%
26	Jumadi	125,00%	75,00%	65,00%	22.943.310	91,22%	8,78%	540.723.780	91,22%	8,78%
27	Ida Yanti	300,00%	255,00%	175,00%	5.160.000	95,25%	4,75%	337.744.439	95,25%	4,75%
28	Kurdi, S.Sos	95,00%	85,00%	102,00%	15.498.000	92,56%	7,44%	263.000.000	92,56%	7,44%
29	Fatmawati	89,00%	74,00%	99,00%	4.721.528	92,02%	7,98%	125.800.000	92,02%	7,98%
30	Sunawi	75,00%	65,00%	88,00%	36.930.000	57,05%	42,95%	129.652.000	57,05%	42,95%
	Jumlah	364,16%	2427,85%	1946,74%	1.520.326.624	1790,35%	1209,65%	2.860.554.991	1790,35%	1209,65%
	Rata-Rata	121,81%	80,93%	64,89%	50.677.554	59,68%	40,32%	95.351.833	59,68%	40,32%

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2011

Tabel 3.6 menjelaskan bahwa rata-rata tingkat koletibilitas kegiatan *Revolving Loand Fund* di Kabupaten Situbondo mencapai 40.32% atau dengan kata lain tingkat *Rate Repayment* hanya 59.68%. Sungguh sangat menyedihkan kondisi kegiatan bidang ekonomi PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Situbondo, bahkan DIPA pada tahun anggaran 2011 sebanyak 19 LKM masih tetap diglontor BLM dengan nilai fantastis. Adapun sebanyak 11 LKM hanya memperoleh dana pembinaan (Bukan BLM) karena sudah masuk katagori lokasi *Passing-Out* dengan dasar sudah memperoleh BLM tiga kali putaran dan diharapkan sudah mampu secara mandiri memecahkan masalah (kebutuhan) sendiri.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri perkotaan adalah mendorong terbangunnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai komponen dari keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan baik meningkatkan keberdayaan **kelompok yang sudah ada** atau **membangun kelompok baru**. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat menjadi "*entry point*" pengembangan KSM. Namun KSM bukanlah semata-mata kelompok peminjam (sekedar berorientasi ekonomi) dengan memanfaatkan dana BLM. Lebih dari itu KSM merupakan kelompok pemberdayaan. Bisa dikatakan KSM menjadi wadah bagi tumbuhnya rasa percaya diri, semangat kemandirian, saling kepercayaan sosial, **3** dan kebersamaan dan lain-lain

Dalam program penanggulangan kemiskinan, posisi KSM adalah independen. Artinya, KSM *bukan bawahan* BKM/LKM atau Unit Pengelola (UP). Hubungan KSM dengan BKM/LKM dan UP merupakan hubungan kemitraan. Karena itu, pengembangan KSM tidak boleh berorientasi semata-mata sebagai kelompok peminjam (uang) dari BKM/LKM. KSM haruslah mengembangkan kegiatan mandiri atau mengembangkan akses sumber daya sendiri. Ada beberapa Instrumen Evaluasi yang dilakukan untuk menilai perkembangan KSM diantaranya meliputi: Keorganisasian, Administrasi, Permodalan, Usaha dan Akseptasi. Selanjutnya hasil penilaian dapat diungkapkan bahwa ternyata rata-rata KSM

Ekonomi di Kabupaten Situbondo masih berada dalam tahapan **maju (109)** atau dalam kisaran nilai antara 106 – 140 yang dialami oleh sebanyak 53.33% KSM. Capaian ini diperoleh KSM di Desa Alasmalang, Duwet, Kalibagor, Talkandang, Gudang, Semiring, Tanjung Kamal, Kotakan dan Paowan, sedangkan selebihnya masih dalam tahapan **berkembang**. Adapun ada satu buah KSM di Desa Peleyan yang sudah tergolong **Mandiri** dimana skornya mencapai **141**. Memang capaian kinerja KSM sangat ditentukan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal. Apabila diprosentasikan diperoleh fakta bahwa sebagian besar KSM tergolong **katagori maju**, sebesar 43.33% tergolong berkembang dan 3.33% tergolong mandiri.

Studi Empirik

Hasil penelitian tentang bagaimana kondisi empiris di lokasi penelitian (30 desa/kelurahan) sasaran PNPM Mandiri Perkotaan ditinjau dan dianalisis dengan 3 aspek, yaitu: Aspek sosial, Budaya dan ekonomi.

1. Aspek Sosial

Pembahasan aspek sosial ini akan dilihat dalam perspektif sanitasi lingkungan, kelembagaan pendidikan, pengangguran dan kesempatan kerja serta pola hubungan di masyarakat setempat. Peninjauan ini didasarkan pada persepsi masyarakat dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kondisi sanitasi lingkungan yang berkorelasi dengan kesehatan masyarakat di desa sasaran rata-rata kurang sehat (56.67%). MCK, Draenase dan ketersediaan air bersih masih cukup memprihatinkan. Demikian pula mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam menyehatkan kondisi lingkungan tergolong sedang dan tinggi. Hasil ini seolah bertolak belakang dengan persepsi masyarakat tentang kondisi sanitasi lingkungan yang disebabkan karena pengambilan sampel responden kurang sesuai dengan sampel responden yang lain sehingga tampak kontradiktif. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap bidang pendidikan cukup tinggi baik pada memasukkan anak pada usia sekolah maupun kontribusinya pada pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fisik sarana

dan prasarana sekolah. Kondisi ini membuktikan secara sosial betapa kuatnya kepedulian masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan hal ini menunjukkan bahwa di desa sasaran memiliki potensi yang besar guna meningkatkan kualitas SDM dalam upaya membangun desanya agar terwujud kesejahteraan sosial. Sementara itu, sejatinya kesempatan kerja di desa sasaran cukup luas, tetapi kondisi angka pengangguran cukup tinggi

2. Aspek Budaya

Betapa banyak kelembagaan non formal yang ada di lokasi penelitian yang berdiri sejak turun temurun maupun yang masih relatif baru. Kelompok atau kelembagaan olahraga berada pada 73.33% seperti sepak bola, bola volly, kasti dan bulu tangkis secara bersama-sama, sedangkan lokasi desa lainnya hanya terdapat salah satu dari keempat kelompok tersebut. Seni budaya musik di lokasi penelitian juga cukup beragam yang kelestariannya dapat dipertahankan sampai dengan saat ini. Dari 30 lokasi penelitian, sebanyak 19 lokasi yang memiliki kelompok seni budaya musik yang sering tampil pada acara-acara hajatan desa, hajatan rumah tangga, arisan, hari-hari besar nasional dan agama dan momentum lainnya. Kelompok masyarakat yang bentuk kumpulan profesi dan kepemudaan terdapat pada 25% di lokasi penelitian baik yang formal maupun non formal. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa pola komunikasi dan hubungan antar warga masyarakat sangat didasarkan pada nilai-nilai dan semangat kegotong royongan, kekeluargaan dan kebersamaan serta persamaan nasib sehingga kondisi ini akan membawa implikasi pada kemudahan dalam penyebaran informasi.

Kabupaten Situbondo tergolong daerah masyarakat santri yang sangat menghormati beberapa tokoh formal terlebih tokoh non formal (Ulama, Kiyai, Ustadz, Tokoh Masyarakat). Dari total responden yang ada, sebanyak 43.33% pihak yang paling dihormati masyarakat adalah kepala desa. Artinya seorang kepala desa pada umumnya adalah seorang tokoh masyarakat, agama ataupun pemuda dimana secara formal

sekaligus merupakan pemimpin formal patut kiranya jika paling dihormati masyarakat. Sedangkan yang selebihnya kurang menghormati seorang kepala desa yang disebabkan antara lain yang bersangkutan berasal bukan dari seorang tokoh dan dalam perjalanan memerintah di wilayah desanya, yang bersangkutan dinilai sudah tidak kredibel lagi.

3. Aspek Ekonomi

Pada aspek ini beberapa yang dapat dikaji secara mendalam di daerah lokasi penelitian yaitu meliputi sektor pertanian, sektor perikanan dan dukungan pemerintah terhadap kemajuan perekonomian di desa sasaran PNPM Mandiri Perkotaan. Kondisi sektor pertanian khususnya pada aspek pola pengelolaan irigsai sawah untuk tanaman pangan. Sistem pengelolaan irigasi sangat menentukan tingkat produktivitas produk pertanian tanaman pangan, karena di daerah desa sasaran ini sebagian besar secara agroklimak memiliki curah hujan yang relatif lebih rendah dengan lebih banyak bulan kering daripada bulan hujan dalam setahun. Tentang kendala dalam berusaha di daerah desa sasaran bahwa sebanyak 36.67% menyatakan bahwa sistem irigasi kurang baik.

Sub sektor lainnya seperti sektor perikanan di beberapa lokasi penelitian (<33%) pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat di bidang perikanan/ kelautan juga kurang mengembirakan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Persoalannya terdapat pada kondisi sarana dan prasarana serta permasalahan yang tidak berujung, sehingga masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perikanan bagi para nelayan. Kondisi saat ini nelayan masih tergolong banyak yang miskin atau berpendapatan rendah kecuali para juragan. Faktor bantuan sarana dan prasarana yang terbatas, pasar kurang mendukung, modal terbatas dan cuaca kurang mendukung menjadi masalah bagi para nelayan sehingga hasil tangkapan ikan cenderung sedikit.

Pelatihan keterampilan kerajinan bagi masyarakat terutama yang pengangguran dan nelayan cukup mengembirakan. Secara empiris yang menyatakan bahwa pernah

dilakukan pelatihan keterampilan antara 1–2 kali adalah sebanyak 56.67%, yang lebih atau sama dengan 3 kali sebanyak 6.67% dan yang menyatakan tidak pernah ada pelatihan sebanyak 36.67%. Pelatihan dimaksud antara lain pembuatan kerupuk ikan, rengginang, pengemasan ikan asin, pengeringan ikan cumi, perbengkelan, menjahit, pembuatan kue dan lain-lain. Tindak lanjut dari kegiatan itu relatif tidak ada sama sekali misalnya dengan pendampingan untuk akses permodalan maupun proses produksinya. Sesungguhnya Potensi pertumbuhan ekonomi di daerah lokasi sasaran cukup besar karena secara geopolitik, posisi Kabupaten Situbondo berada dalam lalu lintas jalur perekonomian antar propinsi dan pulau.

Hasil Kajian Konseptual Terhadap Pedoman Pelaksanaan dan SOP RLF

1. Analisis Pedoman Kegiatan RLF

Dalam pedoman kegiatan RLF tersebut di atas ada beberapa syarat dan ketentuan umum yang belum diadopsi, terutama yang terkait dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Adapun ketentuan umum yang belum diadopsi dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan RLF dimaksud antara lain :

- a. Peminjam harus diwajibkan untuk menabung selain kewajiban menabung simpanan wajib tanggung renteng, namun besar tabungannya bersifat sukarela. Dengan diwajibkannya anggota KSM peminjam untuk menabung sukarela, maka hal ini mendorong untuk senantiasa bekerja keras guna menjalankan usahanya dengan baik sehingga tingkat keuntungannya semakin tinggi.
- b. Perlunya keterlibatan secara partisipatif dari seorang tokoh agama ataupun masyarakat dalam segenap proses pelaksanaan kegiatan RLF. Masyarakat Situbondo terkenal dengan masyarakat santri yang tunduk dan patuh pada seorang Kiyai maupun seorang yang disegani. Jika seorang tokoh terlibat mulai dalam tahapan sosialisasi sampai dengan pengawasan, maka diharapkan KSM tidak akan mengurangi penyimpangan terhadap komitmen yang telah dibangun bersama terlebih masuk sebagai pengurus KSM, karena pemimpin non formal cenderung lebih diteladani daripada pemimpin formal.
- c. Perlunya dilakukan seleksi yang obyektif dan ketat dalam proses rekrutmen Faskel Ekonomi. Tindakan KKN oleh Koorkot dan KMW yang selama ini disinyalir sangat kental, akan mengorbankan masyarakat desa sasaran.
- d. Latar belakang pendidikan UPK harus linier dengan kegiatan RLF. Banyak sekali ditemukan, bahwa latar belakang pendidikan pengurus UPK sangat menyimpang dari kesesuaian bidang yang ditangani. Bahkan sebagian kecil terdapat pengurus UPK bahkan sebagai manajer yang masih lulusan SLTP walaupun sejatinya tinggi rendahnya pendidikan seorang pengurus UPK tidak senantiasa berbanding lurus dengan peningkatan kinerja.
- e. Perlunya diterapkannya sisten agunan bagi anggota KSM yang mengajukan pinjaman kedua kalinya atau seterusnya dengan besar pinjaman minimal Rp 1.000.000,-. Berdasarkan pengalaman sebelas tahun, bahwa tingkat kolektibilitas yang tinggi disebabkan karena persepsi masyarakat tentang BLM ini bersifat hibah, sehingga walaupun mereka sanggup membayar angsuran, namun tidak mau membayarnya.
- f. Pmpinan Kolektif (PK) LKM/BKM wajib dibentuk tupoksi dengan berbasis Gugus Tugas, yaitu: Gugus Tugas bidang lingkungan, Ekonomi dan Sosial. Dengan demikian peran setiap anggota PK LKM/BKM memiliki tanggungjawab yang besar, terutama pada kegiatan RLF sebagai roh atau urat nadi kehidupan BKM secara mandiri dan berkelanjutan.
- g. UPK hendaknya dapat dibayar secara profesional melalui berbagai sumber dana misalnya sharing antara sebagian SHU kegiatan perguliran dan APBD selama minimal 5 tahun sejak lembaga masyarakat ini dibentuk dan beroperasi. Jika hanya mengandalkan SHU, maka honor UPK sangat kecil,

sehingga para pelakunya kurang bekerja sungguh-sungguh karena dianggap sebagai pekerjaan relawan.

- h. Berhubung laba kegiatan RLF masih relatif kecil, maka SHU pada kondisi belum aman sebaiknya dialokasikan hanya pada pemupukan modal (70%) dan selebihnya honor UPK saja plus dana sharing APBD selama 5 tahun pertama. Selanjutnya pada tahun ke-6 dan seterusnya, alokasi pemupukan modal dari SHU secara perlahan dikurangi persentasinya, karena tingkat RR diharapkan meningkat walaupun dana sharing APBD sudah dicabut.
- i. Dewan Pengawas UPK sebaiknya juga diberikan reward berupa intensif dari hasil SHU dengan harapan agar keberadaannya dapat berfungsi nyata bukan sebagai pelengkap saja. Besar kecilnya insentif ini sangat tergantung persentase perkembangan SHU setiap bulannya dan hal ini harus diatur atau dituangkan dalam ART UPK. Selama ini Dewan Pengawas tidak boleh diberi intensif, sehingga berdampak pada kinerjanya memburuk.

2. Analisis SOP Kegiatan RLF

SOP kegiatan RLF pada PNPM Mandiri Perkotaan secara konseptual sejatinya sudah sangat ideal. Meskipun demikian hal itu masih bersifat umum (general) berlaku secara nasional dan kurang memperhatikan kondisi sosial dan budaya serta kearifan lokal. Oleh karena itu, dalam bahasan berikut ini akan diuraikan beberapa hal terkait dengan pentingnya adopsi kondisi sosial budaya dan sumberdaya lokal di Kabupaten Situbondo

- a) Wajib seorang Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat terlibat di dalamnya baik sebagai Dewan Pengawas kegiatan RLF, anggota maupun pengurus. Misalnya seorang ustadz, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun/Lingkungan, Perangkat Desa, LPM, BPD, pengurus Ormas dan lain-lain adalah seorang yang disegani, dihormati dan dita'dimi oleh masyarakat.
- b) Dalam SOP semula bahwa penetapan bunga/jasa pinjaman berorientasi pada suku bunga pasar. Artinya besarnya bunga/jasa wajar tanpa subsidi sehingga

dapat menutup biaya operasi, risiko pinjaman, memelihara nilai modal awal dan tingkat keuntungan tertentu. Jasa pinjaman berkisar 1,5% s/d 3% tetap per bulan, minimal sama dengan jasa pinjaman BRI Unit Desa. Namun menurut fenomena di Kabupaten Situbondo bahwa jasa pinjaman ditetapkan sebesar 1,5% dari KSM ke UPK dan sebesar 2% dari Anggota KSM kepada Pengurus karena 0,5% dibuat untuk cadangan dan biaya operasional pengurus. Jika 3% jasa pinjamannya dirasa sangat berat oleh anggota karena dalam persaingan suku bunga pasar saat ini semakin mengecil bahkan kurang dari 1%/bulan pada Bank konvensional.

- c) BKM telah merekrut Dewan Pengawas minimal 3 s/d 5 orang yang memenuhi kriteria yakni minimal 1 orang memahami P2KP, 1 orang memahami kredit mikro dan 1 orang memahami pembukuan. Dewan pengawas diupayakan berasal dari PKK, BKD, Koperasi, penduduk yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi.
- d) Termasuk dalam katagori keluarga miskin dan non miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat termasuk keberadaan tokoh masyarakat dan atau tokoh agama baik sebagai anggota terlebih sebagai pengurus KSM atau setidaknya seorang tokoh tersebut menjadi Dewan Pengawas kegiatan RLF.
- e) Sanggup menabung secara teratur sesuai kemampuannya, dimana tabungan akan disimpan di UPK dan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap anggota KSM.
- f) Hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan anggota-anggota KSM guna mencermati rencana ekonomi rumah tangga, peluang usaha mikro dan kebutuhan akan pinjaman guna mengembangkan usahanya Pertemuan rutin itu, wajib dihadiri oleh UPK dan Gusus Tugas UPK sebagai pembina dan pembimbingnya.
- g) Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk

- meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya dimana motivatornya dapat berasal dari Tenaga Pendamping, UPK, PK BKM/LKM dan *stake holders* melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan-pelatihan.
- h) Setiap anggota KSM wajib sudah memiliki usaha ekonomi produktif baik berskala mikro maupun kecil, karena pada prinsipnya pinjaman dana dari program ini hanyalah bersifat sebagai tambahan modal saja (bukan modal awal), terlebih bukan sebagai manfaat untuk kebutuhan konsumtif.
- i) Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada, walaupun sudah atau sedang memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan lainnya dapat juga memperoleh pinjaman modal dari PNPM MP asalkan dari hasil analisis usaha menunjukkan mampu untuk membayar angsuran dengan skim: Selisih Penghasilan Bersih (Keuntungan) dari usaha ekonomi produktif dengan total pengeluaran rumahtangga per bulan harus = minimal 2 x angsuran.
- j) Kesanggupan untuk saling menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak dapat memenuhi kewajinan membayar kembali pinjaman kepada UPK, apabila melanggar perjanjian dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
- k) Memberikan kuasa kepada UPK-BKM untuk memindahbukukan tabungan kelompok, jika pada saat jatuh tempo angsuran KSM tidak penuh atau tidak mampu membayar
- l) Bagi anggota KSM yang akan mengajukan pinjaman pada periode berikutnya dengan nilai minimal Rp 1.000.000,- diwajibkan pakai jaminan fisik selain jaminan Simpanan Tanggung Renteng yaitu berupa surat-surat berharga.
- m) Diupayakan tokoh masyarakat dilibatkan dalam kegiatan ini seperti menjadi Dewan Pengawas dan Pengurus/Anggota KSM Ekonomi.

Proses Pelaksanaan Program Perguliran (RLF)

Rekrutmen UPK, Pembentukan KSM Ekonomi, Daerah Asal Faskel Ekonomi, Proses Pelaksanaan Kegiatan RLF merupakan aspek yang ditinjau dalam memotret proses pelaksanaan kegiatan RLF pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Situbondo. Gambaran beberapa indikator tersebut didasarkan dari hasil wawancara maupun observasi langsung selama beberapa kali peristiwa tersebut terjadi. Aspek pembentukan Unit Pelaksana Keuangan di Kabupaten Situbondo dapat disajikan pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7. Proses Rekrutmen UPK dalam PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Situbondo

No	Persepsi Masyarakat Tentang Proses Pembentukan UPK	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Mendaftar atas inisiatif sendiri setelah membaca pengumuman	3	10,00
2	Mendaftar atas didesak/didorong BKM/LKM dan pihak lainnya	5	16,67
3	Tanpa melalui proses pendaftaran atau ditunjuk langsung BKM/LKM	22	73,33
Jumlah		30	100,00
No	Proses Seleksi Sesuai SOP	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Ada proses seleksi sesuai dengan SOP	3	10,00
2	Tidak ada proses seleksi	27	90,00
Jumlah		30	100,00
No	Motivasi Masuk Menjadi UPK	Jumlah (Orang)	Persentase (%)

1	Merasa terpanggil secara moral dan untuk menambah ilmu khususnya pembukuan dan pengalaman baru	4	13,33
2	Agar dapat mendorong perekonomian di desa lebih baik khususnya bagi taraf hidup orang miskin	5	16,67
3	Untuk mengabdikan kepada masyarakat	7	23,33
4	Terpaksa masuk sbg UPK karena yang lain tidak ada yang mau	3	10,00
5	Mengisi Luang Waktu Senggang	2	6,67
6	Menambah Penghasilan	5	16,67
7	Mengabdikan pada masyarakat, Prihatin dengan Kondisi kemacetan di UPK, mengisi waktu luang, ada tambahan penghasilan	4	13,33
Jumlah		30	30,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2011

Proses pembentukan UPK sebagian besar berlangsung tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, tetapi berdasarkan penunjukan langsung dari BKM/LKM khususnya koordinatornya sesuai dengan pertimbangan yang bersangkutan. Sebagian yang ditunjuk adalah kekerabatan terdekat, teman sejawat dan keluarga perangkat desa/kelurahan yang dinilai memiliki kemampuan di bidang perguliran dan pengalamannya seperti ketua arisan PKK, Yasinan, Sholawatan, tahlilan dan lain-lain. Bahkan ada juga berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetitif serta pertimbangan dasar lainnya yang relatif kurang rasional. Adapun proses pembentukan UPK yang sesuai dengan SOP hanyalah 10% saja dan selebihnya juga sesuai dengan SOP namun masih ada nuansa pengkondisian dari BKM.LKM. Artinya b dari 30 BKM/LKM yang ada bahwa yang melakukan proses seleksi sesuai SOP hanyalah 10% saja, sedangkan sisanya tanpa melalui proses yang semestinya.

Proses Pembentukan KSM ekonomi sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan RLF, dimana semakin sesuai dengan SOP dengan mempertimbangan kearifan lokal, maka kegiatan tersebut cenderung berhasil sesuai harapan dan sebaliknya. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian desa sasaran (33.33%) proses pembentukan KSM ekonomi dilaksanakan jauh dari SOP yang ada. LKM/BKM menunjuk beberapa orang saja sesuai dengan suka hati asalkan dapat bekerja sama dengan PK LKM/BKM. Hanya

sebanyak 36.67% LKM/BKM membentuk KSM ekonomi dilakukan secara prosedural, namun belum mengemasnya dengan kearifan lokal sesuai dengan sosia kultural di desa sasaran. Tenaga Pendamping atau Tim Fasilitator secara umum berasal dari luar daerah Kabupaten Situbondo termasuk Faskel Ekonomi. Sejak diluncurkannya program pemberdayaan ini Faskel Ekonomi berasal dari luar daerah seperti dari Kota Surabaya, Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Malang dan lain-lain. Kondisi ini cenderung berpengaruh terhadap intensifikasi pendampingan kegiatan RLF di Kabupaten Situbondo, terlebih latar belakang pendidikan UPK bukan berasal dari bidang ekonomi. Namun hasil temuan di lapangan bahwa sebagian saja (25%) Faskel ekonomi yang intens melakukan pendampingan dengan kapasitas yang cukup memadai.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa setiap KSM ekonomi yang mengajukan pinjaman modal, hanya 53.33% yang membuat proposal, selebihnya tanpa menyusun proposal. Hal ini dapat terjadi karena diakibatkan antara lain : PK LKM dan UPK tidak berkomitmen pada aturan yang ada dan terdapat kepentingan tertentu; Faskel Ekonomi kurang optimal dalam melaksanakan proses pendampingan dan tekanan dari unsur tertentu agar mempermudah proses pengajuan dana pinjaman tanpa syarat apapun. Itupun sebagian KSM ekonomi yang mengajukan proposal, hanya 36.67% yang dilakukan proses verifikasi oleh UPK dan PK LKM. Selebihnya proposal yang diajukan dianggap

benar sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi apalagi ada desakan dari pihak Satker dan PPK Kabupaten agar BLM ini segera dimanfaatkan. Dari hasil verifikasi hanya sebagian kecil saja pencairan dana yang didasarkan pada kelayakan proposal, sedangkan sebagian lainnya tanpa memperhatikan kelayakan proposal. Pada saat pencairan dilakukan, sebagian besar hanya dihadiri oleh ketua dan bendahara dan atau sekretaris KSM, dan hanya 33.37% yang dihadiri oleh semua anggota KSM. Sehingga tidak berlebihan jika ada temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa hanya 40% KSM yang membayar tepat waktu, sedangkan selebihnya tidak tepat waktu bahkan dilakukan resceduling akibat tidak sanggup membayar pengembalian melebihi jangka waktu pengembalian yang disepakati antara KSM dengan UPK melalui akad perjanjian di atas materai. Apabila terjadi kemacetan pengembalian di tingkat KSM, sebagian besar 53.33% UPK membiarkannya tanpa harus menemukani faktor penyebabnya. Hanya 16.67% yang berusaha mencari tahu penyebab kemacetan tersebut dan selebihnya mencoba menagih dengan pola jempot bola. Itupun tidak banyak berhasil, hanya 40% saja yang berhasil memaksa KSM untuk memenuhi kewajibannya baik dengan berkelompok ataupun per anggota.

Laporan Keuangan Bulanan UPK

Kondisi laporan keuangan UPK selama ini memang kurang tertib dilakukan oleh sebagian besar UPK, karena juga disebabkan UPK merasa masih ada pekerjaan lain yang segera diselesaikan. Selain itu,

kemampuan UPK yang sebagian besar kurang memadai karena kurang intens belajar akibat menganggap pekerjaan di program ini hanyalah pengabdian saja dan kurang profesional. Kondisi ini akibat Faskel Ekonomi tidak melakukan pendampingan yang serius. Hasil kajian di lapangan membuktikan bahwa terdapat UPK yang dalam satu tahun lebih tidak membuat laporan keuangan UPK, padahal dalam Audit Eksternal (Independent) UPK ini lolos dari pemeriksaan keuangan dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Secara lebih terinci mengenai hasil laporan UPK sampai dengan Bulan Agustus 2011 dapat disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa UPK-LKM Peleyen Indah Desa Peleyen Kecamatan Panarukan tergolong UPK yang rajin dan tertib melakukan pembukuan dan laporan keuangan setiap bulan diantara UPK lain di Kabupaten Situbondo. Bahkan RR tertinggi dicapai oleh UPK Peleyen Indah dimana setiap bulannya tidak kurang dari 90%, dan capaian RR 100% seringkali terjadi di UPK ini. Fenomena di atas cukup menarik bahwa yang menyusun laporan keuangan UPK dengan tertib dan intens justru dilakukan oleh UPK-LKM yang umur kelahirannya relatif muda yaitu antara tahun 2007 – 2009. Adapun yang umumnya sudah senior yang lahir sejak tahun 1999 dan 2003 sebagian banyak yang tidak tertib. Kecuali UPK-LKM Maju Sejahtera Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan yang sejak awal tertib pembukuan, tetapi pasca banjir bandang sejak tahun 2006, laporan keuangan bulanan mulai kacar-kacir akibat data banyak yang terbawa banjir.

Tabel 3.8. Laporan Keuangan Bulanan UPK PNPM MP Kabupaten Situbondo

NO	Nama Responden UPK	BLM Awal Berdiri	BLM sampai dengan Hari ini	Modal dari Pihak Ketiga (Chandling)	BLM Modal Pergutiran (Di Neraca) = 3+ 4+ 7	SHU Sampai Dengan Hari Ini	Alokasi Untuk Pemupukan Modal	Alokasi Untuk Infrastruktur	Alokasi Untuk Sosial	Alokasi Untuk BOP LKM	Alokasi Untuk Gaj UPK	Alokasi Untuk Lain-Lain	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Salim	114.000.000			-	-	-	-	-	-	1.155.000	-	991.569
2	Purtono	76.000.000	76.000.000		76.000.000	314.000	-	-	-	-	100.000	-	2.201.353
3	Supriyadi	20.000.000	20.000.000		20.000.000	473.732	-	-	-	-	1.710.000	421.834	1.508.732
4	Yos Prayitno	76.000.000	69.300.000		76.190.760	2.093.565	6.890.760	7.925.690	-	-	900.000	-	428.000
5	Nur Samsi	19.250.000	19.250.000		19.413.500	544.932	163.500	544.900	-	-	483.750	67.626	420.283
6	Mesari Thohir	19.250.000	19.250.000		19.541.100	970.318	291.100	-	-	-	473.000	257.400	328.950
7	H. Moh. Salim	76.000.000	69.300.000		86.904.900	15.422.178	17.604.900	2.917.450	-	-	1.200.000	25.000	749.548
8	A. Fuzai Y	74.073.065	-		-	(229.939)	-	-	-	-	-	52.500	539.700
9	Agus Sopyan, SP.D	11.250.000	11.250.000		11.250.000	(210.431)	-	-	-	-	-	-	2.812.500
10	Sumarwan	11.250.000	11.250.000		11.250.000	-	-	-	-	-	-	-	659.000
11	Hayim Iyus	76.000.000	57.750.000		59.910.000	14.248.656	2.160.000	-	-	7.200.200	947.500	815.487	815.700
12	Suryadi	11.500.000	11.500.000		11.982.500	1.608.285	482.500	-	-	1.608.500	100.000	-	926.500
13	Rasyid	19.250.000	-		-	-	-	-	-	-	-	317.500	1.000
14	Ir. Nanang H.I	76.000.000	-		-	(17.011)	-	-	-	-	-	45.000	328.200
15	Bokarsa	10.500.000	10.500.000		10.823.250	1.077.512	323.250	-	-	-	240.000	105.000	214.700
16	Ari Purwanto	270.375.000	240.375.000		287.714.582	-	47.339.582	-	-	-	-	75.000	-
17	Abdul rasyid, Dis	480.293.750	-		42.698.555	28.564.955	42.698.555	-	-	11.188.936	4.400.000	-	2.400.000
18	Abdul Wahid	76.000.000	26.950.000		27.414.500	3.610.228	464.500	4.842.000	-	-	1.280.000	155.000	6.779.900
19	Ronald F	480.793.750	69.300.000		71.226.790	5.867.936	1.926.790	-	-	13.754.510	-	-	34.315.931
20	Anrisyanto	76.000.000	2.000.000		2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000
21	Abdul Aziz	76.000.000	45.000.000		45.769.750	-	769.750	-	-	-	-	-	1.297.383
22	Sri Yuli	76.000.000	88.400.000		98.764.894	6.466.887	10.364.894	5.118.667	3.412.445	1.706.222	400.000	6.824.890	460.915
23	Abd. Latif	19.250.000	19.250.000		19.831.400	1.937.988	581.400	1.937.900	-	-	420.000	35.000	838.000
24	Budi Asona	15.000.000	15.000.000		15.000.000	1.564.175	-	-	-	-	600.000	354.000	10.468.000
25	Anida	76.000.000	183.800.000		196.614.760	14.755.053	12.814.760	-	-	-	4.700.000	-	1.048.550
26	Junardi	240.723.500	238.637.745		242.196.495	1.472.995	3.558.750	-	-	-	1.245.563	-	238.637.745
27	Ilda Yanti	175.744.000	158.307.333		183.995.233	8.251.233	25.687.900	-	-	5.137.580	8.990.765	-	153.169.753
28	Kuati, S.Sos	163.956.000	162.234.000		165.032.500	1.076.500	2.798.500	-	-	559.700	979.475	-	161.674.300
29	Fatmawati	95.800.000	95.238.194		97.925.694	2.125.694	2.687.500	-	-	537.500	940.625	-	94.700.694
30	Sunawi	62.500.000	11.406.400		21.651.400	(40.848.600)	10.245.000	175.133	175.133	350.266	1.050.798	-	10.705.868
	Jumlah	3.074.759.065	1.731.248.672		1.921.102.563	71.140.841	189.853.891	23.461.740	3.587.578	42.043.414	32.316.475	9.551.237	729.822.774
	Rata-Rata	102.491.969	59.698.230	#DIV/0!	64.036.752	2.371.361	6.328.463	809.026	123.710	1.449.773	1.114.361	329.353	24.327.426

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2011

Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Kolektibilitas

Hipotesis yang menyatakan bahwa beberapa variabel faktor yang diduga kuat berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas pada kegiatan RLF PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Situbondo adalah **terbukti** atau H0 ditolak atau H1 diterima pada taraf nyata α 1% yang ditunjukkan secara analisis secara simultan bahwa F-hitung (3.403) > F-tabel (2.99). Namun demikian Adjusted R Square yang dihasilkan hanya sebesar 0,339 atau R Square = 0.480 yang bererati bahwa Tingkat kolektibilitas kegiaiatan RLF tersebut ditentukan oleh 33.9% variabel independent dalam model, selebihnya ditentukan oleh variabel lain di luar model yang dibangun. Tetapi menurut pendapat Rietveld dan Sunaryanto (1993) bahwa dalam penelitian sosial dengan tipe data *cross section* Adjusted R² antara 0.3 – 0.6 sudah digolongkan tinggi.

Sesungguhnya dalam proses analisis ini melalui uji asumsi klasik diperoleh

beberapa gejala penyakit *autocorelacy* sehingga variabel X₃, X₁₂ dan D₁₀ harus di-*droup* dari model karena mengganggu validitas model yang digunakan. Misalnya dari 22 variabel independent sebelum di-*droup* dari model, maka hanya 1 variabel independent yang signifikan dengan nilai Adjusted R² di bawah 0.3 atau relatif rendah. Tetapi setelah beberapa variabel independnet dikeluarkan dari model, maka hasilnya sebagaimana yang tampak pada tabel 3.9. Dalam analisis *autocorelacy* untuk data *cross section* sering terjadi ada variabel endogen tidak bebas merupakan peubah lag yang mempengaruhi variabel bebas. Adanya gejala autokorelasi bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi berganda yaitu bahwa tidak ada korelasi antar galat acaknya. Selanjutnya jika dalam model persamaan regresi berganda tersebut terdapat autokorelasi, maka cara mengatasinya adalah menggunakan metode *Cochrane-Orcutt* yang merupakan metode iteratif. Dengan dikeluarkannya 3 variabel

independent dalam model, maka akhirnya sisanya tinggal 19 variabel independent sebagaimana model persamaannya sebagai berikut:

$$Y_i = 9.220 + 0,305 X_1 - 0,087 X_2 - 0,059 X_4 - 0,255 X_5 - 0,891 X_6 - 0,109 X_7 + 0,038 X_8 - 0,081 X_9 + 0,107 X_{10} - 0,034 D_1 - 0,028 D_2 + 0,143 D_3 + 0,228 D_4 - 0,074 D_5 - 0,095 D_6 - 0,432 D_7 - 0,095 D_8 + 0,028 D_9$$

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap variabel independent terhadap variabel dependent secara parsial dianalisis dengan Uji-t melalui Analisis OLS (Gujarati, 1995). Dari hasil uji-t ini diperoleh fakta bahwa dari 19 variabel independent ternyata terdapat 6 (enam) variabel independent yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent dan lainnya berpengaruh nonsignifikan tampak pada tabel 3.9. Uraian secara terperinci mengenai hasil uji secara parsial ini akan dibahas sebagai berikut:

a) Peningkatan Keuntungan Anggota KSM setelah Mendapat RLF

Fenomena ini sangat menarik, karena hasil uji menunjukkan bahwa nilai koefisien regresinya adalah sebesar 0.305 pada taraf nyata 1% dengan kategori signifikan. Dalam konteks ini tanda koefisien ini menjadi menarik karena bertanda negatif, yang berarti semakin untung peminjam modal dalam kegiatan RLF PNPM MP di Kabupaten Situbondo sebesar 1%, maka tingkat kolektibilitasnya semakin bertambah sebesar 0.305%. Kondisi ini bertentangan dengan teori dan normatif yang berlaku, sejatinya semakin besar tingkat keuntungan seseorang dalam berusaha, maka tingkat kolektibilitasnya (kemacetan) semakin rendah. Fenomena ini dapat terjadi, walaupun anggota KSM sebagai peminjam memperoleh keuntungan, namun dia enggan untuk membayar angsuran karena persepsi mereka bahwa BLM ini bersifat hibah yang tidak perlu dikembalikan. Selain itu, ketika anggota KSM sudah mengsngur kepada pengurus KSM, namun tidak disetor kepada UPK pada saatnya tetapi masih digunakan secara pribadi oleh pengurus atau diputar kembali kepada anggota

lainnya karena mungkin pengurus belum mengerti mekanisme yang diberlakukan.

b) Tingkat Pendidikan Anggota KSM

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota KSM berpengaruh secara non signifikan paada tingkat kolektibilitas kegiatan RLF yang ditunjukkan bahwa nilai t-hitung < t-tabel pada taraf nyata 10%. Dengan asumsi *ceteris paribus*, bahwa jika semakin tinggi tingkat pendidikan anggota KSM, maka tingkat kolektibilitas semakin rendah sebesar 0.087%. Fenomena ini sesuai dengan teori bahwa jika semakin rasional pola pikir seseorang maka semakin bijaksana sikap yang ditampakkannya, dimana dalam hal ini berarti semakin tinggi pendidikan anggota KSM maka dorongan untuk mampu membayar angsuran semakin tinggi dengan kata lain tingkat kolektibilitas semakin rendah atau tingkat RR semakin tinggi.

c) Pengalaman Berusaha Anggota KSM

Variabel ini terkait dengan *skill* anggota KSM dalam menjalankan usahanya, dimana semakin lama anggota KSM menjalankan usahanya, maka cenderung dapat memajukan usahanya. Artinya dimensi waktu pengalaman ini dapat menentukan keberhasilan usaha yang dijalankan seiring dengan dinamika yang dialami seperti tantangan, hambatan, kendala, potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Berdasarkan dimensi tersebut, maka sepatutnyalah variabel ini menjadi penentu terhadap faktor kolektibilitas kegiatan RLF. Hasil uji-t menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel independent ini sebesar - 0.059 yang berarti bahwa semakin lama pengalaman anggota KSM mengelola usahanya, maka tingkat kolektibilitasnya semakin rendah dan sebaliknya dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini juga sesuai dengan teori bahwa dengan pengalaman jam terbang tinggi dalam mengelola usaha ekonomi produktif maka semakin tertib dalam membayar angsuran.

d) Jumlah Anggota Keluarga Anggota KSM

Hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga anggota KSM adalah 4.01 orang atau tergolong keluarga sedang dengan kisaran 2- 6 orang. Pada umumnya, kepala keluarga dalam

upaya memenuhi kebutuhan rumahtangganya bekerja keras agar dapat mencukupi seluruh kebutuhannya. Kondisi ini berdampak pada usaha yang dijalankan selama ini, dengan dibantu anggota keluarganya maka pengelolaan usaha ekonomi tentunya dikelola dengan sungguh-sungguh apalagi didorong oleh sebagian modal usahanya diperoleh dari pinjaman. Oleh karena itu, hasil uji-t menunjukkan bahwa nilai t -hitung > t -tabel pada taraf nyata 5% dimana nilai koefisien regresinya sebesar - 0,255 yang berarti bahwa H_0 ditolak. Semakin lama pengalaman anggota KSM dalam mengelola usahanya, maka tingkat kolektibilitasnya semakin rendah dan sebaliknya dengan asumsi bahwa *ceteris paribus*.

e) Tingkat Suku Bunga Pinjaman

Hasil analisis parsial diperoleh hasil bahwa nilai koefisien regresi sebesar -0,891 dengan nilai t -hitung > t -tabel pada taraf nyata 1%. Artinya semakin tinggi jasa pinjaman, maka akan berdampak pada penurunan tingkat kolektibilitas dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain dalam model konstan (*ceteris paribus*). Secara teoritis bahwa semakin tinggi jasa pinjaman yang diberlakukan maka kecenderungannya tingkat kemacetan semakin tinggi atau berbanding lurus. Atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi jasa pinjaman, pada umumnya tingkat pengembalian (RR) semakin rendah atau tingkat kolektibilitasnya semakin tinggi akibat kemampuan peminjam semakin lemah terlebih dipicu oleh usahanya yang kurang lancar, kebutuhan keluarganya semakin banyak dan iklim usaha semakin tidak kondusif.

Fenomena ini cukup menarik dalam konteks permasalahan pada kegiatan RLF di Kabupaten Situbondo ini, dimana kecenderungan pinjaman dengan bunga/jasa yang semakin tinggi mendorong tingkat kolektibilitas (kemacetan) semakin rendah. Kondisi ini diduga disebabkan karena anggota KSM yang merasa bunga pinjaman relatif tinggi, maka lebih terdorong untuk bekerja keras agar usahanya lebih berkembang dan maju. Sedangkan bila bunga pinjaman relatif lebih rendah, maka mereka cenderung meremehkan sehingga tingkat pengelolaan

usahanya tampak asal-asalan. Penyebab lainnya adalah tidak semua menganggap bahwa jasa pinjaman yang berlaku ini tergolong rendah, karena di lembaga keuangan pemerintah seperti BRI Unit ataupun BKD, bunga pinjamannya lebih kecil daripada 1% per bulan. Sehingga jasa pinjaman dalam PNPM MP ini tergolong relatif tinggi, sehingga menjadi pemicu guna lebih mengintensifkan pengelolaan usahanya.

f) Frekuensi Pengawasan dan Pembinaan BKM/LKM dan UPK kepada KSM

Rata-rata jumlah frekuensi pengawasan PK LKM dan UPK terhadap KSM rata-rata 0.55 kali per putaran dengan kisaran antara 0 – 2 kali. Sungguh saat ironis ketika yang tidak melakukan pengawasn dan binaan sama sekali terjadi pada 55.56% UPK di Kabupaten Situbondo, adapun yang hanya 1 kali sebanyak 30% UPK dan selebihnya melakukannya sebanyak 2 kali. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel ini sebesar - 0,109 dengan t -hitung < t -tabel pada taraf nyata 10% atau H_0 diterima. Namun demikian makna tanda negatif pada nilai koefisien ini adalah sesuai dengan teoritis. Bahwa semakin banyak frekuensi pengawasan pada kegiatan RLF dan terlebih jumlah pembinaan usaha pada KSM, maka tingkat kolektibilitasnya semakin rendah. Tetapi kemudian yang terjadi bahwa sebagian besar PK LKM dan UPK tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh akibat tidak pahamnya tupoksi masing-masing ataupun karena sifatnya yang hanya pengabdian.

g) Tingkat Fasilitas Fakel/Askot MK terhadap BKM/LKM dan UPK

Kapasitas Faskel Ekonomi dan Askot MK dalam melakukan pendampingan di masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan RLF. Tupoksinya yang sangat luas terhadap proses pendampingan di lapangan menunjukkan bahwa betapa beratnya memfasilitasi kegiatan RLF dengan beragamnya latar belakang pelaku di desa sasaran. Secara hipotetis dapat diungkap bahwa hasil uji-t menunjukkan nilai koefisien regresi variabel ini sebesar 0.038 dan nilai t -hitung < t -tabel pada taraf nyata 10% atau non

signifikan. Artinya semakin besar kapasitas tenaga pendamping dalam memfasilitasi pelaku program maka akan semakin tinggi pula tingkat kolektibilitas (K) kegiatan RLF sebesar 0.038%. Meskipun hal ini tidak signifikan, namun tanda koefisien regresinya kontradiktif dengan logika normatif. Hal ini disebabkan karena sejatinya semakin tinggi fasilitas tenaga pendamping terhadap kegiatan RLF ini maka cenderung menurunkan nilai K dan sebaliknya. Hal ini dapat terjadi karena jumlah sampelnya relatif kurang banyak, responden kurang jujur dalam memberikan informasi data dan lain-lain. Sesuai dengan tabel 5.33 bahwa anggota KSM banyaak yang tidak tepat sasaran (Tidak Masuk dalam Daftar KK Miskin dalam PS-2) dan tidak memiliki usaha produktif dimana hal ini dinyatakan oleh 50% responden, bahkan menurut pernyataan 53.33% responden bahwa ada banyak anggota KSM yang menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif.

h) Frekuensi Pertemuan Rutin KSM Minimal per Bulan

Rapat rutin KSM misalnya satu bulan sekali dengan agenda membahas pembayaran angsuran dan evaluasi pada kegiatan usaha ekonomi produktifnya. Semakin istiqomah anggota KSM mengadakan pertemuan rutin, maka akan semakin kuat usaha yang dijalankan karena pada hakekatnya berhimpunnya masyarakat dalam KSM kerena memiliki masalah, kebutuhan daan tujuan bersama sehingga dipandang perlu dilakukan evaluasi secara rutin. Namun rata-rata pertemuan rutin ini hanya 0.9 kali per bulan dengan kisaran 0 – 2 kali. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai koefisien regresinya sebesar -.081 dengan berarti bahwa semakin tertib pertemuan rutin diselenggarakan oleh KSM maka tingkat K akan cenderung berkurang sebesar 0.081% setiap bulannya dengan asumsi *ceteris paribus*. Namun hal ini kondisinya non signifikan, tetapi dalam jangka panjang bila hal ini dilakukan pertemuan rutin secara terus menerus maka dimungkinkan akan menjadi signifikan.

i) Nilai Besaran Pinjaman setiap Anggota KSM

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebanyak 43.33% responden

menyatakan nilai pinjaman dari BLM PNPM Mandiri Perkotaan terlalu kecil (maksimum Rp 500,000,- dan bila lancar dapat meminjem kembali lebih dari ketentuan maksimum sebanyak 4 kali dan maksimum total penjaman Rp 2,000,000,-). Sehingga hasil Uji secara parsial menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,671 dan nilai *t*-hitung > *t*-tabel pada taraf nyata 1%. Artinya semakin besar nilai pinjaman modal dari kegiatan RLF PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Situbondo, maka tingkat kolektibilitasnya justru semakin tinggi atau RR-nya semakin rendah. Fenomena ini cukup menarik karena berbanding terbalik atau kontradiktif dengan logika ekonomi dan teoritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) sebanyak 60% Usaha ekonomi produktif anggota KSM mengalami gulung tikar atau kerugian; 2) sebanyak 50% Anggota KSM tidak tepat sasaran (Tidak Masuk dalam Daftar KK Miskin dalam PS-2) dan tidak memiliki usaha produktif, namun tetap diberikan dana pinjaman; 3) Belum ada keterlibatan atau peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses kegiatan RLF mulai dari proses pembentukan KSM sampai dengan pelaksanaannya, dimana hal ini dinyatakan oleh 76.67%; 4) sebanyak 83.33% menyatakan Kontrol masyarakat secara mandiri masih lemah; 5) Tidak ada jaminan atau agunan (Dalam SOP tidak diperbolehkan ada agunan/jaminan dalam bentuk apapun) yang dinyatakan oleh 66.67% responden; dan 6) sebagian responden (33.33%) menyatakan Tanggungjawab Pengurus KSM masih lemah.

j) Nilai Simpanan Wajib Tanggung Renteng Sebesar Minimal 10%

Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel ini sebesar 0.107, namun nilai *t*-hitung < *t*-tabel pada taraf nyata 10% atau berpengaruh non signifikan. Walaupun tidak signifikan, tetapi tanda koefisien regresi ini bertolak belakang dengan teori dan logika ekonomi dimana semakin tinggi nilai simpanan tanggung renteng, maka tingkat K semakin tinggi pula dan sebaliknya dengan asumsi *ceteris paribus*. Sejatinya semakin besar nilai simpanan tanggung renteng, maka tingkat K seharusnya semakin rendah karena kemacetan tersebut

dapat diatasi dengan mentanspormasikan nilai simpanan tanggung renteng menjadi nilai pengembalian angsuran bagi yang bersangkutan. Menariknya bahwa non signifikan karena nilai 10% simpanan tersebut tidak akan cukup menutupi masalah tunggakan pengembalian yang nilainya jauh lebih besar daripada simpanan tanggung renteng. Adapun kontradiktifnya tanda koefisien regresi variabel ini diantara penyebabnya adalah hasil kajian mengungkapkan bahwa sebanyak 90% lebih UPK tidak memberlakukan simpanan wajib tanggung renteng minimal 10%, tetapi pengajuan pinjaman yang disetujui UPK dan PK LKM diberikan semua pada KSM sehingga hal ini berdampak pada setiap anggota KSM yang cenderung meremehkan.

k) Latar Belakang Pendidikan UPK 4

Hasil uji-t menunjukkan bahwa nilai t-hitung < t-tabel (non signifikan) pada taraf nyata 1% dengan nilai koefisiennya sebesar -0,034. Kondisi ini sudah sesuai dengan logika ekonomi dimana semakin linier dan semakin tinggi latar belakang pendidikan pengurus UPK, maka tingkat K semakin rendah dan sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus. Namun yang menarik adalah bahwa pengaruh variabel ini non signifikan pada tingkat kolektibilitasnya. Hal ini disebabkan karena secara faktual di lapangan bahwa tidak menjamin latar belakang yang semakin tinggi dengan jurusan yang kian linier dengan bidang kegiatan RLF akan meningkatkan kinerja pengelolaan UPK. Bukti yang terungkap bahwa ada pengurus UPK yang sudah S1 dengan jurusan ekonomi akuntansi tetapi tingkat RR-nya masih lebih rendah dengan yang lulusan lebih rendah dan jurusannya kurang linier dengan kegiatan RLF bahkan dibandingkan dengan lulusan SLTP sekalipun.

l) Pola Pembentukan KSM Ekonomi

Proses pembentukan KSM ekonomi sebagian besar tidak dilakukan sesuai SOP, tetapi dengan cara ditunjuk oleh UPK maupun PK LKM/BKM yang dianggap dapat bekerja sama dengan yang bersangkutan. Secara parsial hasil uji-t menghasilkan analisis bahwa nilai koefisien regresi variabel ini adalah sebesar -0,028, tetapi nilai t-hitung < t-tabel pada taraf nyata 10% yang berarti non

signifikan. Secara logika ekonomi bahwa tanda koefisien regresi tersebut sudah sesuai dengan teori dimana semakin baik pola pembentukan KSM ekonomi maka akan semakin rendah tingkat kolektibilitasnya, dan sebaliknya. Menariknya adalah non signifikansi variabel ini terhadap variabel dependent karena selama ini belum ada keterlibatan atau peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses kegiatan RLF mulai dari proses pembentukan KSM sampai dengan pelaksanaannya secara konkrit dan partisipatif, dimana hal ini dinyatakan oleh 76,67% responden. Selain itu, pengaruh non signifikansi ini juga disebabkan karena dinilai proses pelaksanaan RLF tidak sesuai SOP oleh sebanyak 70% responden, hanya 30% saja responden yang menyatakan proses pembentukan KSM sesuai dengan SOP, itupun tidak seluruhnya melibatkan tokoh agama/masyarakat.

m) Jenis Usaha Anggota KSM

Hasil uji secara parsial dengan menggunakan OLS diperoleh nilai koefisien regresi variabel independent ini sebesar 0,143 yang berarti bahwa semakin homogen (seragam) maka tingkat K semakin tinggi. Fenomena ini cukup menarik untuk dicermati karena variabel ini berpengaruh non signifikan terhadap variabel dependent, 5 mana hal ini ditunjukkan hasil analisis Uji-t bahwa t-hitung < t-tabel pada taraf nyata 10%. Menurut logika ekonomi bahwa semakin seragam usaha anggota KSM maka upaya pengawasan dan pembinaan terhadap usaha anggotanya semakin mudah dan diharapkan akan semakin membawa usaha ekonomi yang dijalankan akan semakin maju dan berkembang. Sebaliknya jika usaha anggota dalam satu KSM semakin bervariasi, maka cenderung menyulitkan pengawasan dan pembinaan usaha anggotanya terutama dalam mengontrol kegiatan RLF. Fenomena ini dapat terjadi karena faktanya di lapangan rata-rata KSM dengan jenis usaha anggota yang bervariasi justru tingkat RR-nya cenderung tinggi, sebaliknya KSM dengan jenis usaha anggotanya relatif seragam, sebaagian besar justru tingkat K relatif tinggi.

n) Proses Pencairan RLF kepada Anggota KSM

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel independent ini berpengaruh nyata terhadap variabel dependent dinamakan ditunjukkan dari hasil analisis OLS menunjukkan bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ pada taraf nyata 5% dengan nilai koefisien regresinya sebesar 0,228. Artinya apabila proses pencairan BLM kepada KSM semakin melibatkan semua anggota KSM dan diawali dengan survei lapang, maka tingkat K semakin tinggi. Fenomena ini juga berbanding terbalik dengan logika empirik, karena seolah proses pencairan BLM dengan cara diam-diam (hanya pengurus KSM) dan tidak diawali dengan survei lapang terlebih dahulu, maka tingkat K semakin rendah. Kondisi ini dapat terjadi karena dari hasil penelitian dapat diungkap bahwa kehadiran anggota KSM dalam proses pencairan BLM hanyalah rekayasa oknum pengurus KSM semata agar dapat dinilai bahwa KSM yang terbentuk benar-benar riil, padahal sejatinya hanyalah mereka dibayar oleh pengurus dan bukan anggota sesungguhnya. Selain itu, KSM yang menerima pencairan BLM sesuai dengan SOP ini ternyata dalam perjalannya banyak terjadi penyimpangan misalnya dana yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan karakter anggota KSM yang sesungguhnya mampu membayar tetapi enggan mengangsur.

o) Persepsi KSM Terhadap Sifat Bantuan Pemerintah atas RLF yang Diterima

Sebanyak 30% responden menerima informasi dari provokator yang menyesatkan yang menyatakan bahwa pinjaman modal dari kegiatan RLF PNPM Mandiri Perkotaan bersifat Hibah yang tidak perlu dikembalikan. Oleh karena itu, hasil analisis OLS ini membuktikan bahwa nilai koefisien regresi variabel ini sebesar -0,074 yang berarti semakin jelas persepsi masyarakat bahwa pinjaman modal dari kegiatan RLF ini memang bukan hibah, tetapi wajib dikembalikan untuk digulirkan kembali pada masyarakat yang berhak menerimanya, maka tingkat K semakin rendah dan sebaliknya walaupun hal ini didukung oleh hasil Uji-t dimana $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ pada taraf nyata 10%. Tidak signifikansinya pengaruh variabel independent ini terhadap variabel dependent karena diduga kesalahan mengambil sampel

dan informasi data yang diperoleh relatif kurang baik dan kurang banyak.

p) Pemahaman anggota KSM terhadap Perjanjian Anggota, Akad Simpan Pinjam dan Surat Pengakuan Hutang

Pada umumnya anggota KSM ekonomi kurang memahami terhadap perangkat perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh pengurus. Tanda tangan anggota dalam beberapa bagian proposal, sejatinya tidak memahami apa yang dimaksud termasuk substansi hukum yang melekat di dalamnya. Yang penting bagi mereka adalah segera dicairkan BLM yang diajukan kepada UPK-LKM agar dapat segera dimanfaatkan dalam tambahan modal usahanya ataupun dengan tujuan lainnya. Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel ini tidak signifikan pengaruhnya terhadap tingkat kolektibilitas kegiatan RLF, hal ini ditunjukkan dengan $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ pada taraf nyata 10%. Tetapi nilai koefisien regresinya adalah sebesar -0,093 yang berarti bahwa semakin paham anggota KSM terhadap perjanjian anggota, akad simpan pinjam dan surat pengakuan hutang, maka semakin rendah tingkat K kegiatan RLF ini. Karena mereka sadar bahwa dengan konsekuensi hukum yang akan berdampak nantinya akan memberikan dorongan kepada anggota agar komitmen dengan perangkat perjanjian tersebut melalui bekerja keras agar dapat mengelola usaha ekonomi dengan intens sehingga tertib membayar angsuran.

q) Persepsi Anggota KSM tentang Tingkat Suku Bunga (Jasa) yang Diberlakukan

Variabel ini berkaitan dengan psikologis anggota KSM ekonomi tentang besarnya jasa pinjaman modal kegiatan RLF PNPM Mandiri Perkotaan yang diberlakukan. Bagi setiap anggota KSM memiliki persepsi yang berbeda tentang nilai jasa pinjaman tersebut tatkala disesuaikan dengan kondisi usaha yang dijalankan selama ini dan juga bila dikomparasikan dengan jasa pinjaman pada pihak lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, persepsi ini akan berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan usahanya yang akan berakibat lanjut terhadap keuntungan yang akan diperoleh dan kemampuan membayar angsuran. Hasil analisis OLS mengungkapkan

bahwa ternyata variabel ini sangat berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent dinama hal ini ditunjukkan oleh nilai $-t$ hitung $<$ $-t$ -tabel pada taraf nyata 1%. Adapun nilai koefisien regresinya sebesar -0,432 yang artinya bahwa apabila anggota KSM persepsi tentang jasa pinjaman tersebut rendah, maka tingkat K semakin rendah dan sebaliknya.

r) Persepsi Daerah Asal Tenaga Pendamping Faskel Ekonomi

Asal daerah tenaga pendamping (Faskel) ekonomi tampaknya cukup menentukan terhadap berhasil tidaknya kegiatan RLF PNPM Mandiri Perkotaan. Pertimbangannya adalah Faskel Ekonomi dari luar daerah, jika tidak berdiam di lokasi dampingan selama proses pendampingan berlangsung akan mengganggu proses fasilitasi kecuali memiliki basecamp. Adapun jika Faskel Ekonomi berasal dari dalam daerah, maka diharapkan proses fasilitasi pendampingan akan semakin baik. Hasil uji-t menunjukkan bahwa hasil t -hitung $<$ t -tabel pada taraf nyata 10% atau non signifikan dengan nilai koefisien regresinya sebesar -0,095. Artinya bahwa jika faskel ekonomi berasal dari dalam daerah desa dampingan, maka tingkat K semakin rendah dan sebaliknya. Tetapi hal ini pengaruhnya non signifikan, meskipun harus patut dipertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari daerah asal faskel ekonomi masing-masing.

s) Pemahaman KSM terhadap Pedum, Pelak dan SOP RLF

Sebagaimana hasil penelitian ini terungkap bahwa sebanyak 63.33% pengelola dan anggota KSM kurang memahami SOP perguliran ekonomi. Tetapi hasil uji OLS membuktikan bahwa variabel ini berpengaruh non signifikan terhadap variabel dependent dinama nilai t -hitung $<$ t -tabel pada taraf nyata 10% dan nilai koefisien regresinya sebesar 0,028 yang artinya semakin paham anggota KSM terhadap Pedum, Pelak dan SOP RLF, maka tingkat K semakin tinggi. Secara logika ekonomi fenomena ini tampak kontradiktif dimana sesungguhnya harus semakin turun. Hal ini terjadi akibat semakin paham anggota KSM maka upaya memainkan rekayasa

(penyiasatan) terhadap aturan main tersebut semakin kuat. Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa sebanyak 33.33% pengurus KSM yang dianggap kurang bertanggungjawab pada anggotanya dan sebanyak 53.33% anggota KSM yang mengerti aturan menggunakan modal pinjaman untuk kebutuhan konsumtif dan sama sekali bukan untuk kebutuhan pengembangan usahanya dijadikan dasar usulan pinjaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Profil 30 BKM/LKM di Kabupaten Situbondo secara umum memiliki perkembangan dengan **Kategori Berdaya** dengan skor 45%, sedangkan kinerja UPK rata-rata kurang memadai dengan rata-rata tingkat kolektibilitas kegiatan *Revolving Loan Fund* di Kabupaten Situbondo mencapai 40.32% atau dengan kata lain tingkat *Rate Repayment* hanya 59.68%. Semenatra itu, sejumlah profil **KSM Ekonomi di semua desa sasaran P2KP-PNPM MP** memiliki perkembangan dengan tahapan **maju (109)** atau dalam kisaran nilai antara 106 – 140 yang dialami oleh sebanyak 53.33% KSM, sedangkan selebihnya masih dalam tahapan **berkembang**. Adapun ada satu buah KSM di Desa Peleyan yang sudah tergolong **Mandiri** skornya mencapai **141**.

Hasil studi empirik aspek-aspek sosial budaya, dan ekonomi di daerah desa sasaran PNPM MP di Kabupaten Situbondo mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aspek Sosial: Kondisi sanitasi lingkungan yang berkorelasi dengan kesehatan masyarakat di desa sasaran rata-rata kurang sehat (56.67%); Keberadaan kelembagaan pendidikan yang ada di desa sasaran secara fisik menunjukkan dalam

- kondisi cukup baik (66.67%) dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap bidang pendidikan tergolong tinggi yaitu rata-rata 83.33%; Kesempatan kerja di desa sasaran cukup luas, tetapi kondisi angka pengangguran cukup tinggi yaitu mencapai lebih 40%; Bahwa masyarakat lebih dominan menjalin hubungan sosial yang baik kepada Kyai dibandingkan kepada pemimpin formal.
2. Aspek Budaya: Banyaknya kelembagaan non formal yang ada di lokasi penelitian yang berdiri sejak turun temurun maupun yang masih relatif baru; Kelompok masyarakat yang bentuk kumpulan profesi dan kepemudaan terdapat pada 25% di lokasi penelitian baik yang formal maupun non formal; Kabupaten Situbondo tergolong daerah masyarakat santri yang sangat menghormati beberapa tokoh formal terlebih tokoh non formal (Ulama, Kiyai, Ustadz, Tokoh Masyarakat).
 3. Aspek Ekonomi (Sebagian besar responden menyatakan sistem irigasi di daerah lokasi penelitian cukup baik; Sebagian besar responden (36.67%) menyatakan bahwa sistem irigasi kurang baik dan hal ini menjadi kendala serius dalam berusahatani; Sebanyak < 33% responden menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat di bidang perikanan/ kelautan juga kurang mengembirakan
 4. Hasil kajian konseptual terhadap Pedoman Pelaksanaan dan SOP Dana Pinjaman Bergulir (RLF) yang menjadi landasan hukum pelaksanaan program mulai dari P2KP1.1 sampai dengan PNMP Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut : Pedoman Pelaksanaan dan SOP RLF masih berlaku umum dan bersifat normatif serta belum berbasis komunitas lokal.
 5. Hasil kajian terhadap proses pelaksanaan program di lapangan dan dukungan pemerintah daerah terhadap program ini adalah sebagai berikut: Proses pembentukan UPK dan KSM ekonomi masih jauh dari pedoman pelaksanaan dan SOP yang ada.
2. Hasil inventarisasi data laporan keuangan bulanan kegiatan pinjaman bergulir pada setiap UPK yang berbasis kolektibilitas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: Secara umum laporan keuangan bulanan UPK tidak selalu tepat waktu, dan Kondisi Kolektibilitas Kegiatan RLF PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut: K1 sebesar 20%, K2 sebesar 3%, K3 sebesar 7%, K4 sebesar 3% dan paling banyak (67%) adalah K5.
Hasil analisis akar penyebab rendahnya tingkat *Repayment Rate* (RR) dan tingginya resiko (K3–K5) pada kegiatan pinjaman bergulir adalah sebagai berikut:
 - a) Analisis Secara Simultan: Seluruh variabel yang diduga dalam model secara simultan berpengaruh nyata terhadap variabel dependnet. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Uji-F pada taraf nyata 1% dimana F-hitung (3.403) > F-tabel (2.99). Nilai *Adjusted R-Square* yang dihasilkan hanya sebesar 0.339 yang berarti bahwa Tingkat kolektibilitas kegiatan RLF tersebut ditentukan oleh 33.9% variabel independent dalam model.
 - b) Analisis Secara Parsial: Hasil analisis OLS mengungkapkan bahwa dari sejumlah faktor akar penyebab tingkat Kolektibilitas kegiatan RLF PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Situbondo yang berpengaruh nyata (signifikan) pada taraf nyata 10%, 5% dan 1% meliputi: 1) Peningkatan Keuntungan anggota KSM setelah mendapat RLF, 2) Jumlah anggota keluarga Peminjam, 3) Tingkat suku bunga, 4) Nilai besaran pinjaman setiap anggota KSM, 5) Proses pencairan RLF kepada anggota KSM dan 6) Persepsi anggota KSM tentang tingkat suku bunga yang diberlakukan. Adapun selebihnya berpengaruh tidak nyata (non signifikan) terhadap variabel dependent.

4.2. Saran-Saran

1. Bagi Pengambil Kebijakan: Perlunya penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan dan SOP Kegiatan RLF dengan memperhatikan komunitas lokal; dan Perlunya dianggarkan melalui APBD

- Pemerintah kabupaten Situbondo guna mendukung kegiatan RLF PNPMD Mandiri Perkotaan setidaknya untuk membantu memberikan insentif bagi UPK agar kinerjanya lebih baik
2. Bagi Konsultan Pendamping: KMP dan KMW hendaknya lebih cermat dalam menilai kinerja Tim Faskel, Askot dan Koorkot agar tidak menjadi penyebab rusaknya proses pelaksanaan kegiatan program terutama kegiatan RLF. Dalam hal rekrutmen Tenaga Pendamping khususnya Faskel Ekonomi dan Askot MK agar dilakukan secara profesional. Optimalisasi peran KMW khususnya TA MK agar tim faskel dapat mendapat advis yang kuat dalam melaksanakan kegiatan dampingan di masyarakat.
 3. Bagi Pelaku Program: PK LKM hendaknya dapat menjalankan Tupoksinya secara optimal walaupun hal ini bersifat keikhlasan tanpa memandang kepentingan kelompok dan pribadi; UPK sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya agar RR senantiasa di atas 90% per bulan; dan KSM ekonomi merupakan tulang punggung bagi keberlangsungan PNPMD MP ini, oleh karena itu, KSM berupaya agar dapat mengembangkan kapasitas dirinya menjadi sebuah kelompok yang sangat produktif, kreatif dan maju.
- Pramoetadi, 2004. Aplikasi Analisa Medan Kekuatan (*Force Field Analysis*) Dalam Penyusunan Sub Project Proposal. (www.dikti.org).
- Rietveld, P. dan Sunaryanto, L.T. 1993. Delapan Puluh Tujuh Masalah Pokok dalam Regresi Berganda. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.
- Whitney, F.L. and J. Milholland. 1933. A Four year Continuation Study of A Teachers College Class. *Jour. Educ. Res.* 1933. Pp. 193-199. Dalam Nazir, 1985. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Wuisman, J.J.J.M., 1991. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Kerjasama Pusat Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (PPIIS) dengan Proyek Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Brawijaya, Universitas Leiden.- Negara Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009. Pedoman Teknis Keorganisasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Draper, N. dan Smith, H. 1992. Analisis Regresi Terapan. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Gujarati, D.N., 1995. Basic Econometrics. McGraw-Hill International Editions. New York.
- Nazir, 1985. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Parel *et al*, 1973. Sampling Design and Procedures, The agricultural Development Council.

RESTORASI KOLEKTIBILITAS DANA PINJAMAN BERGULIR PNPM MANDIRPERKOTAAN MELALUI SISTEM PENGORGANISASIAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS LOKAL DI KABUPATEN SITUBONDO

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

elib.pdi.lipi.go.id

Internet Source

4%

2

jurnal.unmuhjember.ac.id

Internet Source

4%

3

es.scribd.com

Internet Source

1%

4

digilib.unmuhjember.ac.id

Internet Source

1%

5

eprints.umsida.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off